



# LAPORAN | 2021 KINERJA KABUPATEN BONDOWOSO





## KATA PENGANTAR

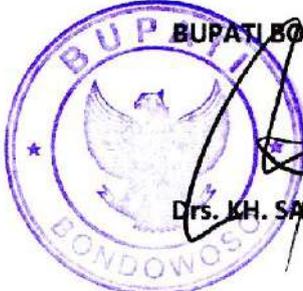


Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dapat selesai dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 ini melaporkan capaian kinerja Bupati Drs. KH. SALWA ARIFIN periode tahun 2018-2023, disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan diukur sesuai sasaran strategis yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan dari target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, yang dijabarkan menjadi target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, arahan, serta partisipasi aktif dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021.

Bondowoso, 15 Maret 2021

 **BUPATI BONDOWOSO**  
  
**Drs. KH. SALWA ARIFIN**



## IKHTISAR EKSEKUTIF

**B**

erdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, maka pelaksanaan kinerja dilaporkan dan

diukur berdasarkan capaian kinerja terhadap indikator sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kabupaten Bondowoso Tahun 2020, yang merupakan pelaksanaan dari target kinerja RPJMD Tahun 2018 - 2023 dan target kinerja tahunan dalam RKPD Tahun 2021.

Secara keseluruhan penyelenggaran pemerintahan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai. Diharapkan hasil pelaksanaan evaluasi terhadap laporan ini dijadikan sebagai motivasi untuk perbaikan kinerja pada masa mendatang, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen keuangan maupun pengawasannya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Adapun pencapaian sasaran strategis yang berupa indikator kinerja utama (IKU) untuk mewujudkan 5 (lima) Misi dari Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, sebagai berikut:

- Misi 1** : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 1.032,24% dengan kategori **memuaskan**.
- Misi 2** : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 96,80% atau kategori **sangat berhasil**.
- Misi 3** : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diperoleh capaian



kinerja rata-rata sebesar 88,41% dengan kategori **sangat berhasil**.

**Misi 4** : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,40% dengan kategori **sangat berhasil**.

**Misi 5** : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101,36% dengan kategori **memuaskan**.

Hasil ketercapaian indikator kinerja utama terhadap target yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja tahun 2021 dengan 18 sasaran strategis dan 26 indikator kinerja utama, diperoleh rata-rata capaian kinerja memuaskan.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL dan GAMBAR.....	v
BABI    PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	2
C. Sejarah Kabupaten Bondowoso.....	2
D. Gambaran Umum Daerah .....	3
1. Kondisi Geografis .....	3
2. Kondisi Demografi .....	7
E. Kondisi Ekonomi Daerah .....	9
1. Potensi Unggulan.....	9
2. Pertumbuhan Ekonomi.....	16
3. PDRB per Kapita.....	21
4. Indeks Gini .....	22
5. Persentase Penduduk Miskin .....	23
6. Tingkat Pengangguran Terbuka.....	23
7. Indeks Pembangunan Manusia.....	25
F. Reformasi Birokrasi.....	26
G. Profil Sumberdaya Aparatur.....	42



H.	Isu Strategis .....	43
I.	Sistematika Laporan Kinerja.....	46
BAB II	PERENCANAAN KINERJA.....	47
A.	Instrumen Pendukung Kinerja. ....	47
B.	Rencana Strategis Tahun 2018-2023 .....	48
1.	Visi dan Misi. ....	48
2.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	54
C.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 .....	57
D.	Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .....	65
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA.....	68
A.	Sistem Pengukuran Kinerja .....	68
B.	Capaian Indikator Kinerja Utama .....	69
C.	Evaluasi dan Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama .....	72
D.	Akuntabilitas Anggaran.....	142
BAB IV	PENUTUP .....	145
LAMPIRAN	.....	146



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Penghargaan Terhadap Kopi Bondowoso .....	11
Tabel 1.2	PDRB ADHB dan ADHK Tahun 2019 - 2021 .....	19
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan & Sumber Pertumbuhan PDRB 2019 - 2021 .....	20
Tabel 1.4	PDRB per Kapita Kabupaten Bondowoso Tahun 2019 - 2021.....	21
Tabel 1.5	Indeks Gini Kabupaten Bodowoso Tahun 2016 - 2021 .....	22
Tabel 1.6	Tingkat Kemiskinan Tahun 2016 - 2021 .....	22
Tabel 1.7	Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2021 .....	23
Tabel 1.8	Nilai PDRB ADHK Tahun 2017-2021 .....	24
Tabel 1.9	Perkembangan IPM Tahun 2016 - 2021 .....	25
Tabel 1.10	Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2019 - 2021 .....	25
Tabel 1.11	Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso .....	27
Tabel 1.12	Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Bondowoso .....	37
Tabel 1.13	Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2021 .....	42
Tabel 1.14	Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021 .....	42
Tabel 1.15	Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2021.....	43
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Strategi RPJMD 2018 - 2023 .....	54
Tabel 2.2	Arah Kebijakan RPJMD 2018 - 2023 .....	56
Tabel 2.3	Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Program Prioritas .....	58
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	65
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.....	69
Tabel3.20	Pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Anggaran Tahun 2021.....	143



## **DAFTAR GRAFIK**

Grafik 1. 1 Wilayah Administrasi Bondowoso .....	5
Grafik 1. 2 Luas Wilayah Bondowoso .....	7
Grafik 1. 3 Jumlah Penduduk .....	8
Grafik 1. 4 Jumlah Penduduk Sesuai Usia .....	7
Grafik1. 5 Fasilitas Perdagangan .....	12
Grafik 1. 6 Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2019 - 2021.....	17
Grafik 1. 7 Pertumbuhan PDRB 2017 - 2021. ....	18
Grafik 3. 1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2021.....	71
Grafik 3. 2 Persentase Pertumbuhan PDRB Bondowoso .....	72
Grafik 3. 3 Peningkatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Tahun 2017 - 2021 .....	73
Grafik 3. 4 Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2021 .....	89
Grafik3.5 Kondisi Jalan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2021.....	90
Grafik 3.6 Perkembangan IDM .....	107
Grafik 3. 7 Perkembangan Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM .....	107
Grafik 3. 8 Indeks Perkembangan Manusia .....	122
Grafik 3. 9 Indeks Perkembangan Pendidikan .....	122
Grafik 3.10 Rata – Rata Lama Sekolah .....	123



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. 1 Monumen Gerbong Maut Bondowoso.....	3
Gambar 1. 2 Peta Kabupaten Bondowoso.....	4
Gambar 1. 3 Padi Organik Kecamatan Klabang .....	10
Gambar 1. 4 Wisata Kawah Wurung .....	12
Gambar 1. 9 Wisata Kawah Wurung .....	12
Gambar 1. 5 Atraksi Kesenian Tradisional Tari Pojian dan Singo Ulung .....	13
Gambar 1. 6 Industri Keci Kerajinan Kuningan Cindogo .....	14
Gambar 1. 7 Industri Kecil Batik Bondowoso .....	14
Gambar 1. 8 Eksplorasi Geothermal di Desa Blawan Ijen .....	15
Gambar 1. 9 LPSE.....	30
Gambar 1. 10 Simda Keuangan.....	30
Gambar 1. 11 Simda BMD .....	31
Gambar 1. 12 SIMPEG .....	31
Gambar 1. 13 SIAK.....	31
Gambar 1. 14 REDOK .....	32
Gambar 1. 15 e - Si PIJAR .....	33
Gambar 1. 16 SINKA .....	33
Gambar 1. 17 SIM LPPD .....	34
Gambar 1. 18 SIMDA PERENCANAAN .....	35
Gambar 1. 19 SAID.....	36



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam rangka menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, maka pelaporan dan evaluasi kinerja instansi pemerintah menjadi suatu komponen penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik selaras dengan tujuan peningkatan kualitas pelayanan publik Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai semua elemen masyarakat, utamanya dalam peningkatan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan perencanaan kinerja, perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

#### *Bab 1 Pendahuluan*

- A. Latar Belakang*
- B. Maksud dan Tujuan*
- C. Sejarah Kabupaten Bondowoso*
- D. Gambaran Umum Daerah*
- E. Kondisi Ekonomi Daerah*
- F. Reformasi Birokrasi*
- G. Profil Sumberdaya Aparatur*
- H. Isu Strategis*

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana capaian kinerja



dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan hal tersebut, maka pada setiap akhir tahun anggaran setiap instansi pemerintah wajib melakukan penyusunan laporan kinerja untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dalam mencapai sasaran strategis, dan menyampaikannya kepada Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

## **B. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah tentang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 adalah : memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Pemerintah Kabupaten untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik.

## **C. Sejarah Kabupaten Bondowoso**

Sejarah berdirinya Bondowoso merupakan rangkaian peristiwa panjang yang dimulai dari pengembangan wilayah kekuasaan Besuki ke arah selatan pada Tahun 1789 oleh Menteri Anom Abhiseka Mas Astruno. Pada Tahun 1794 dalam usaha memperluas wilayah beliau menemukan suatu wilayah yang sangat strategis untuk kemudian disebut Bondowoso dengan diangkatnya beliau sebagai demang di daerah yang baru dengan nama Abhiseka Mas Ngabehi Astrotruno atau yang biasa dikenal dengan Raden Bagus Assra.



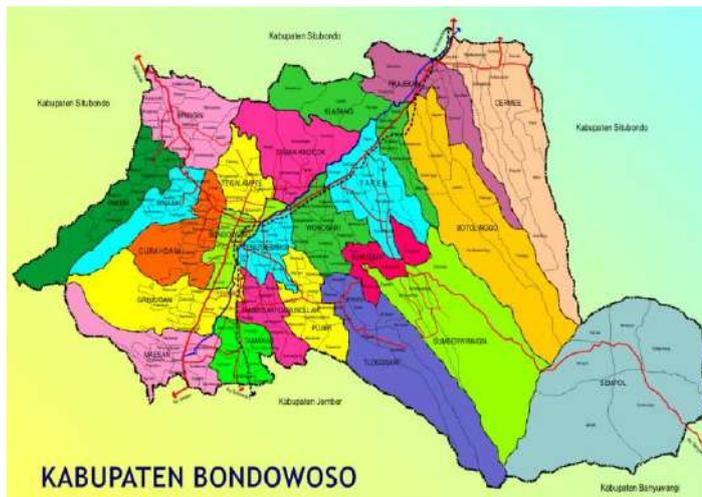
**Gambar 1.1. Monumen Gerbong Maut Bondowoso**

Perkembangan Bondowoso dari hari ke hari semakin meningkat dan tepat pada tanggal 17 Agustus 1819 atau hari selasa kliwon tanggal 25 Syawal 1234 H, Adipati Besuki R. Aryo Prawirodiningrat sebagai orang yang memperoleh kepercayaan dari Gubernur Hindia Belanda, dalam rangka memantapkan strategi politiknya menjadikan wilayah Bondowoso lepas dari Besuki, dengan status Keranggan Bondowoso dan mengangkat Raden Bagus Assra atau Mas Ngabehi Astrotruno menjadi penguasa wilayah dan pimpinan agama, dengan gelar M. NG. Kertonegoro dan berpredikat Ronggo I, ditandai penyerahan Tombak Tunggul Wulung.

## **D. Gambaran Umum Daerah**

### **1. Kondisi Geografis**

Kabupaten Bondowoso yang secara geografis berada pada koordinat antara  $113^{\circ}48'10''$  -  $113^{\circ}48'26''$  BT dan  $7^{\circ}50'10''$  -  $7^{\circ}56'41''$  LS berada di antara pegunungan, yaitu : Pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur dan Pegunungan Hyang dengan puncaknya Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat, sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.



Letak Kabupaten Bondowoso kurang strategis meskipun berada di tengah, namun tidak dilalui jalan negara yang menghubungkan antar provinsi dan tidak memiliki lautan. Wilayah Kabupaten Bondowoso berbatasan

langsung dengan beberapa kabupaten lain, yaitu sebelah utara Kabupaten Situbondo, sebelah selatan Kabupaten Jember, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi, serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Probolinggo.

Wilayah geografis Kabupaten Bondowoso berada pada  $113^{\circ}48'10''$ - $113^{\circ}48'26''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}50'10''$ - $7^{\circ}56'41''$  Lintang Selatan dengan luas wilayah 1.560,10 km<sup>2</sup> atau 3,26% dari total luas Provinsi Jawa Timur, menempati urutan ke-12 dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Secara administratif dibatasi oleh:

- 1) Bagian utara : Kabupaten Situbondo.
- 2) Bagian selatan : Kabupaten Jember.
- 3) Bagian timur : Kabupaten Situbondo dan Banyuwangi.
- 4) Bagian barat : Kabupaten Probolinggo dan Situbondo.

#### **a. Fisik Geografis**

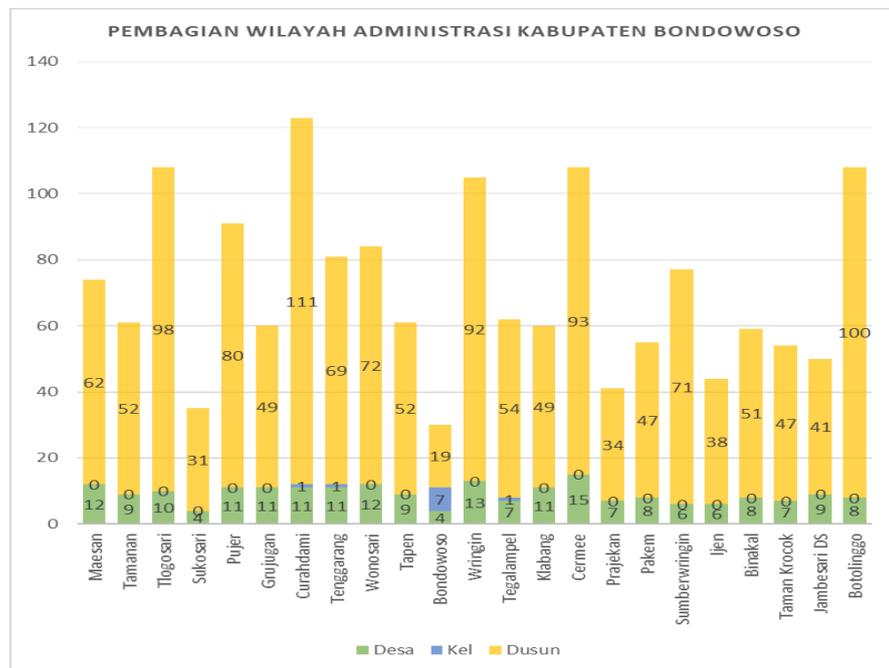
Kabupaten Bondowoso berada diantara pegunungan Kendeng Utara dengan puncaknya Gunung Raung, Gunung Ijen di sebelah timur dan pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa. Letak Kabupaten Bondowoso yang berada diantara pegunungan tersebut, menjadikan kondisi geografis wilayah Kabupaten Bondowoso didominasi oleh daerah dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan dan perbukitan seluas



44,4% dan dataran tinggi seluas 24,9%. Sedangkan dataran rendah hanya seluas 30,7% dari luas wilayah keseluruhan.

Pola aliran sungai di Kabupaten Bondowoso terbentuk akibat pengaruh kondisi wilayah yang didominasi oleh pegunungan dan perbukitan. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang ada yaitu DAS Sampean dengan aliran sungai meliputi Sungai Sampean yang membelah wilayah Kabupaten Bondowoso, DAS Deluwang yang meliputi Sungai Deluwang di sisi barat dan DAS Banyuputih (Kalipahit) yang meliputi Sungai Telaga di sisi timur.

Wilayah Kabupaten Bondowoso sebagian besar didominasi jenis tanah regosol yang mencapai 782,87 km<sup>2</sup> (50,18%) dan tanah andosol mencapai luas 328,59 km<sup>2</sup> (21,06%). Tanah regosol merupakan jenis tanah yang berasal dari material gunung berapi, sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran. Sedangkan tanah andosol merupakan tanah yang berasal dari abu gunung berapi terdapat di lereng gunung api, tanah jenis ini cocok untuk tanaman hutan hujan tropis, bambu, dan rumput.



Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab Bondowoso, 2021

**Grafik 1.1 Wilayah Administrasi**



Pembagian Wilayah Administrasi di Kabupaten Bondowoso terdiri dari 23 kecamatan, 10 kelurahan, 209 desa dan 1.412 dusun dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Bondowoso.

#### **b. Topografi Wilayah**

Kabupaten Bondowoso berada pada ketinggian antara 73 - 3.287 meter di atas permukaan laut (dpl), dengan rata-rata ketinggian  $\pm$  253 meter dpl. Wilayah tertinggi berada pada ketinggian 3.287 meter dpl, tepatnya di puncak Gunung Raung yang masuk wilayah Desa Gunosari Kecamatan Tlogosari, sedangkan dataran terendah berada pada ketinggian 73 meter dpl tepatnya di Desa Grujugan Kecamatan Cermee.

Kabupaten Bondowoso memiliki tingkat kemiringan lereng yang bervariasi. Datar dengan kemiringan  $0^{\circ}$ - $2^{\circ}$  seluas 190,83 km<sup>2</sup> (12,23%), landai  $2^{\circ}$ - $15^{\circ}$  seluas 568,17 km<sup>2</sup> (36,42%), agak curam  $15^{\circ}$ - $40^{\circ}$  seluas 304,70 km<sup>2</sup>(19,53%) dan sangat curam diatas  $40^{\circ}$  seluas 496,40 km<sup>2</sup> (31,82%).

#### **c. Iklim dan Cuaca**

Kabupaten Bondowoso memiliki suhu udara yang sejuk berkisar  $17^{\circ}\text{C}$  hingga  $32^{\circ}\text{C}$  dengan suhu rata-rata  $24,7^{\circ}\text{C}$ . Kelembaban udara rata-rata berkisar antara 62% hingga 90%. Kondisi tersebut tidak terlepas dari posisi geografis wilayah yang berada diantara pegunungan Kendeng Utara dengan puncak Gunung Raung dan Gunung Ijen di sebelah timur serta kaki pegunungan Hyang dengan puncak Gunung Argopuro, Gunung Krincing dan Gunung Kilap di sebelah barat. Sedangkan di sebelah utara terdapat Gunung Alas Sereh, Gunung Biser dan Gunung Bendusa.

Curah hujan rata-rata di Kabupaten Bondowoso sebesar 1.394 mm<sup>3</sup>/tahun dengan jumlah hari hujan sebanyak 76 hari/tahun. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari sebesar 430 mm<sup>3</sup> dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus sebesar 0,1 mm<sup>3</sup>.

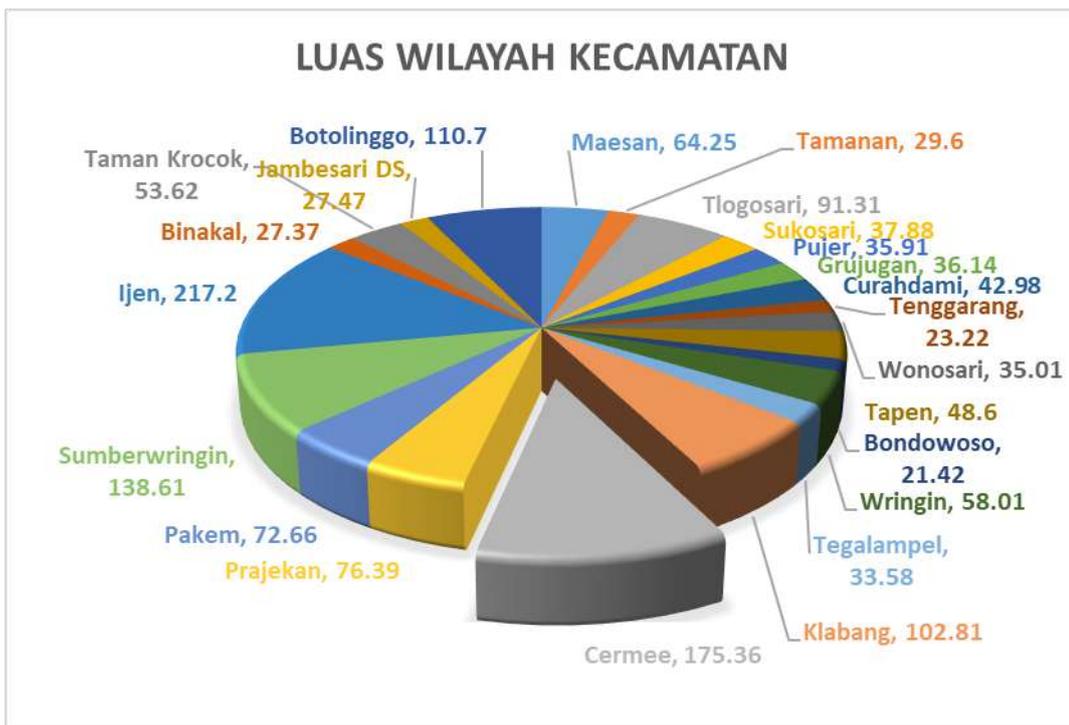


**d. Penggunaan Lahan**

Luas wilayah Kabupaten Bondowoso 90,08% digunakan untuk pertanian yaitu persawahan, tanah kering, perkebunan, kehutanan, rawa dan tambak. Sedangkan sisanya sebesar 7,25% digunakan untuk pemukiman, industri, padang rumput, pertambangan, lahan yang sementara tidak digunakan dan lainnya. Bila dirinci menurut penggunaannya, lahan terluas digunakan untuk kehutanan yaitu sebesar 35,77%. Selanjutnya adalah tegalan/tanah kering 27,66% dan persawahan 20,74%. Sedangkan yang digunakan untuk pemukiman sekitar 4,69%. Lahan terkecil digunakan untuk industri di bawah 1,00%.

**1. Kondisi Demografi**

**a. Kependudukan**



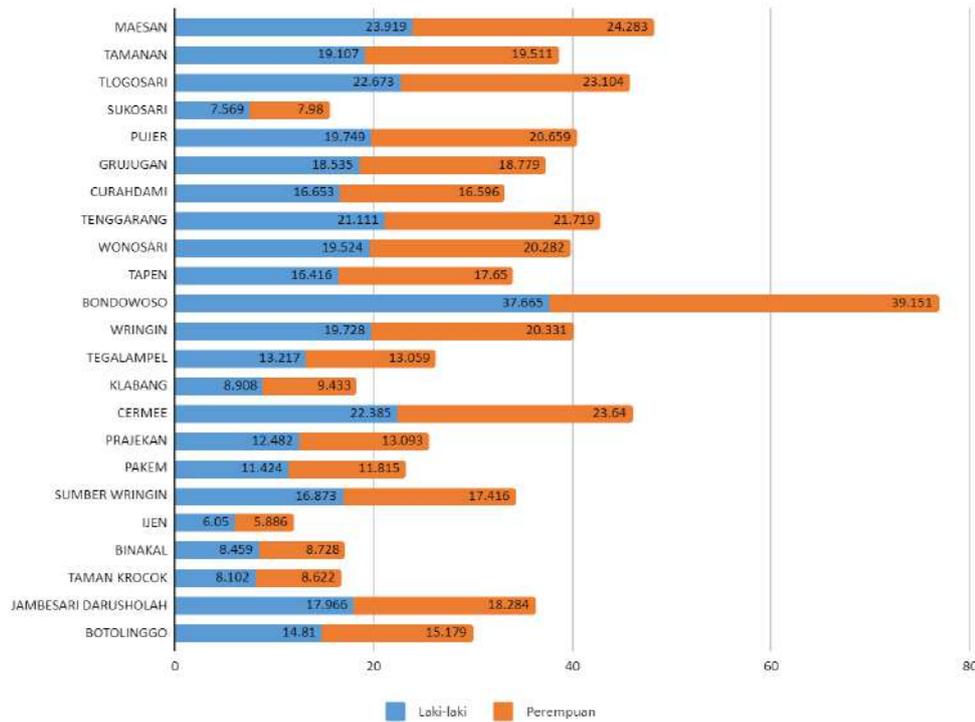
**Grafik 1.2 Luas Wilayah Bondowoso**

Penduduk Kabupaten Bondowoso hingga akhir Desember tahun 2021 mencapai 778.525 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) mencapai 304.083 KK, dari jumlah tersebut terdiri dari 383.325 jiwa penduduk berjenis kelamin laki-laki dan 395.200 jiwa berjenis kelamin perempuan. Rasio jenis kelamin (rasio sex)



penduduk Kabupaten Bondowoso mencapai 0,97 yang berarti bahwa dalam setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 97 jiwa penduduk laki-laki. Komposisi penduduk Kabupaten Bondowoso tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Komposisi Penduduk Kabupaten Bondowoso Menurut Jenis Kelamin Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2021.

### Grafik 1.3 Jumlah Penduduk

Jumlah populasi penduduk terbanyak mencapai 76.816 jiwa (9,87%) berada di Kecamatan Bondowoso dan jumlah populasi penduduk terkecil sebanyak 11.936 jiwa (1,53%) berada di Kecamatan Ijen. Kepadatan penduduk Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021, berkisar 7.032,74 jiwa/km<sup>2</sup>, dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Bondowoso mencapai 3.586,18 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan terendah berada di Kecamatan Ijen sebesar 54,95 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi penduduk Kabupaten Bondowoso menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2021 didominasi kelompok penduduk umur 15-64 tahun (usia produktif) sebanyak 538.471 jiwa (69,17%), sementara nonproduktif hanya sebanyak 240.054 jiwa (30,83%). Komposisi penduduk yang besar pada usia produktif menyebabkan



angka ketergantungan penduduk diperkirakan mencapai 45 per 100 penduduk produktif.

Komposisi penduduk Kabupaten Bondowoso menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber: Badan Pusat Statistik, Bondowoso Dalam Angka Tahun 2021

**Grafik 1.4 Jumlah Penduduk Sesuai Usia**

## E. Kondisi Ekonomi Daerah

### 1. Potensi Unggulan

Pembangunan perekonomian daerah yang sedang dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui pengembangan ekonomi daerah dengan harapan dapat membangun dan mengembangkan potensi ekonomi daerah yang memiliki daya saing tinggi.

Kabupaten Bondowoso memiliki beberapa potensi unggulan yang cukup potensial untuk dikembangkan, antara lain :



**a. Sektor Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bondowoso, hal ini terbukti dengan adanya beberapa wilayahnya berhasil memproduksi pertanian padi organik yang memiliki sertifikasi internasional.



*Gambar 1.7. Padi Siap Panen di Kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso*

Berdasarkan data sementara BPS Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, disebutkan bahwa sektor pertanian masih sebagai penyumbang terbesar pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bondowoso atas dasar harga berlaku tahun 2019 yang mencapai 32,40% dari total PDRB.

Adapun potensi unggulan yang dapat dikembangkan pada sektor pertanian, antara lain yaitu :

- a) Tanaman bahan pangan dengan produksi utama adalah padi, jagung, ketela pohon, ubi jalar dan palawija.
- b) Tanaman hortikultura atau komoditas sayur-sayuran meliputi cabe merah, cabe rawit, kentang, kubis dan tomat.
- c) Tanaman buah-buahan yang meliputi durian, mangga, alpukat, pisang, strowberi dan rambutan.
- d) Tanaman perkebunan meliputi kopi, tembakau, kelapa dan tebu.
- e) Tanaman kehutanan berupa pohon mahoni, jati, gamelina dan sengon.



- f) Peternakan meliputi sapi potong, kambing, domba, ayam kampung, ayam ras petelur, ayam ras pedaging dan itik.
- g) Perikanan air tawar berupa budidaya ikan air tawar seperti mujair, lele, nila.

Salah satu potensi tanaman perkebunan yang menonjol selain tembakau adalah kopi, karena produksi kopi di Kabupaten Bondowoso sangat bagus dan telah mampu merambah pasar ekspor, Kopi Arabica “Java Ijen Raung” Bondowoso telah diekspor ke sejumlah negara di Eropa dan Amerika, ekspor perdana sebesar 18 ton dilakukan tahun 2011 dan ekspor pada tahun 2017 mencapai 1.600 ton, dan pada tahun 2019 meskipun mengalami penurunan ekspor hanya 1.000 ton namun serapan pasar lokal meningkat mencapai 800 ton. Untuk memperluas lahan kopi nantinya dikembangkan pula kluster kopi di daerah Gunung Argopuro. Penghargaan terhadap kopi Bondowoso dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 1.1. Penghargaan Terhadap Kopi Bondowoso**

No	Tahun	Penghargaan
1	2012	Penghargaan KPDT Award Bidang Kebijakan Inovatif Kreatif
2	2013	Sertifikat Indikasi Geografis atas HAKI dari Kemenkumham
3	2014	Penghargaan Pro Poord Award dari Pemprov Jatim
4	2015	Juara 3 Festival Kopi Nusantara
5	2016	Juara 1 Festival Kopi Nusantara
6	2017	Kontes Kopi Spesialti Indonesia ke 9 (nilai tinggi 86,61)
7	2018	Coffee Festival and Cocoa 2019 (fasilitator terbaik tiga)

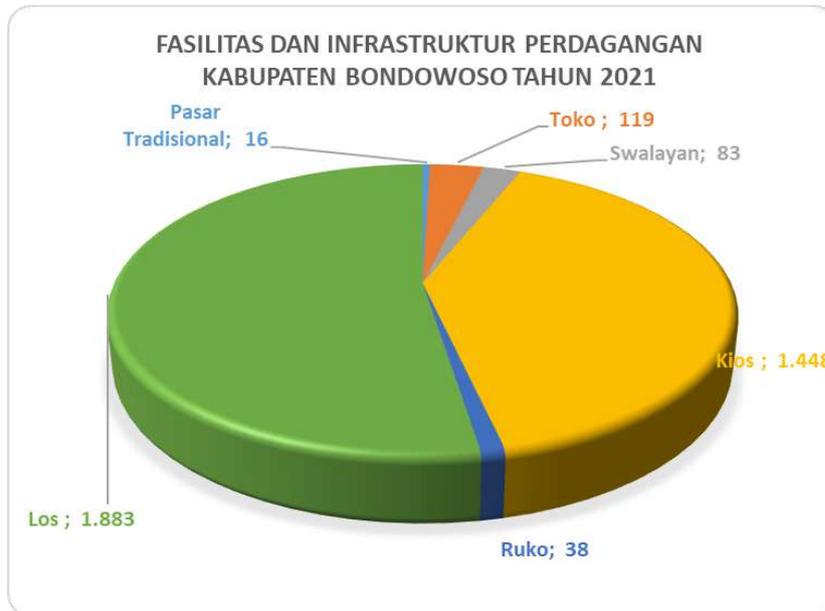
Sumber : KPW Bank Indonesia Jember, Tahun 2019

#### **b. Sektor Perdagangan dan Jasa**

Sektor Perdagangan dan jasa yang menunjang aktifitas perekonomian masyarakat adalah berkembangnya UMKM, pusat perdagangan dan jasa seperti hotel dan restoran yang representatif, sarana perdagangan yang memadai seperti pasar daerah dan pasar desa, serta pengembangan tata ruang kawasan perdagangan, pertokoan dan perumahan.



Ketersediaan fasilitas dan infrastruktur Perdagangan Kabupaten Bondowoso tahun 2021 yang memadai, terdiri dari : Pasar Tradisional 16, Toko 119, Swalayan 83, Kios 1.448, Ruko 38 dan Los terdapat 1.883, sebagaimana gambar berikut :



Sumber : Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bondowoso, Tahun 2021

**Grafik 1.5 Fasilitas Perdagangan**

**c. Sektor Pariwisata**



*Gambar 1.9. Wisata Kawah Wurung*

Wisata alam yang cukup menantang dari wisata air Arung Jeram Bosamba, yaitu dengan berolahraga rafting sambil menikmati pemandangan yang menarik, antara lain : Green Canyon ala Bosamba, Gua Kelelawar dan Simpang 6 Anak Sungai



Sampean Baru, memerlukan waktu selama 2 jam perjalanan menyusuri aliran sungai sepanjang 14 km dan mengarungi 27 jeram besar maupun kecil.

Potensi pariwisata dikembangkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan berbasis kreativitas masyarakat. Secara umum potensi pariwisata di Kabupaten Bondowoso dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu terdiri dari :

- a) **Potensi Alam** adalah potensi wisata yang dikembangkan karena keindahan, keunikan dan kelebihan dari alam, seperti : gunung raung, kawah ijen, kawah wurung, situs megalitikum, batu so'on solor, arung jeram bosamba, tancak kembar, air terjun gentongan, agrowisata kopi arabica dan petik strowberi, desa wisata organik, dll.
- b) **Potensi Kebudayaan** adalah potensi wisata yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa, seperti : peninggalan prasejarah, pawai budaya, macapat, kesenian tradisional singo ulung, topeng konah, kentrung, tari ojung, tari pojien, dll.
- c) **Potensi Kreatif** adalah potensi yang dikembangkan oleh kreasi manusia melalui even-even yang menjadi daya tarik wisata seperti : festival muharram, festival kopi nusantara, jazz de ijen, ijen trail running, ijen night ride, paralayang ijen flying fest, fam trip travel media, festival lampion, dll.



Gambar 1.10. Atraksi Kesenian Tradisional Tari Pojian dan Singo Ulung

#### d. Sektor Perindustrian

Pembangunan sektor perindustrian diarahkan dengan mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) melalui kebijakan peningkatan kapasitas produksi memanfaatkan teknologi informasi dan berbasis sumberdaya lokal.



Potensi sektor perindustrian di Kabupaten Bondowoso didominasi oleh sentra industri kecil dan menengah (IKM), antara lain :

- a) Industri tekstil seperti batik dan bordir.
- b) Industri makanan yang meliputi tape, tahu, tempe, kue, kerupuk dan keripik.
- c) Industri pengelolaan tembakau berupa industri rokok.
- d) Industri galian non-logam seperti batako, batu bata dan genteng.
- e) Industri barang kayu dan hasil hutan yang meliputi kerajinan meubeler, anyaman bambu dan rotan, serta pengolahan kayu sengon.
- f) Industri logam seperti kerajinan perhiasan dari kuningan dan pande besi.
- g) Industri lainnya seperti penggilingan gabah dan tepung.



*Gambar 1.11. Kerajinan Kuningan di Desa Cindogo Kec.Tapen Kab.Bondowoso*



*Gambar 1.12. Industri Kecil Batik Tulis Sumber Sari Kecamatan Maesan Kab.Bondowoso*

Potensi batik khas Bondowoso makin berkembang, tidak saja dikagumi oleh pasar lokal namun juga banyak wisatawan mancanegara yang tertarik untuk



mendapatkannya. Beberapa brand yang sudah dikenal antara lain berlabel “Batik Sumbersari” Kecamatan Maesan dan “Batik Lumbung” Kecamatan Tamanan.

**e. Sektor Pertambangan**

Sektor pertambangan di Kabupaten Bondowoso masih belum dikelola secara maksimal, namun terdapat beberapa potensi sektor pertambangan yang dapat dikembangkan untuk menjadi sektor unggulan Kabupaten Bondowoso, potensi tersebut diantaranya : pasir, batu poles, batu gamping, batu belah, tras, kalsit, gipsum dan belerang.

Potensi panas bumi yang diperkirakan mencapai 110 megawatt di Blawan Kecamatan Ijen merupakan sumberdaya alam yang perlu dikelola dengan optimal, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/62/KPTS/119.3/2011 pada 25 Mei 2011, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah menindaklanjuti dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) oleh Bupati Bondowoso bersama PT. Medco Cahaya Geothermal (MCG) pada tanggal 14 Desember 2015 di Pendopo Kabupaten Bondowoso. Proyek ini diperkirakan beroperasi secara komersial (*commercial operation date*) pada akhir tahun 2020.



**Gambar 1.13. Eksplorasi Geothermal di Desa Blawan Ijen**

Eksplorasi geothermal melalui pengeboran Perdana Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di Blawan Kecamatan Ijen mulai dikerjakan pada hari Selasa, 15 Desember 2015. Proyek pengeboran dikerjakan dengan teknik slim hole



dan hingga akhir Desember 2019 telah dilakukan terhadap 3 (tiga) titik untuk mengeksplorasi potensi energi panas bumi.

## **2. Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu yang dihitung berdasarkan perubahan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Perekonomian Indonesia 2021 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp16.970,8 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp.62,2 juta atau US\$.4.349,5. Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Angka ini merupakan usaha terbaik pemerintah setelah mengalami pertumbuhan negatif pada kuartal I dan pelambatan di kuartal III akibat meningkatnya angka infeksi Covid-19 di Tanah Air. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 masih dalam kisaran target pemerintah yaitu antara 3,5 persen sampai dengan 4,0 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Perbaikan angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didukung oleh perbaikan kinerja ekspor, kenaikan belanja fiskal pemerintah, dan peningkatan konsumsi dan investasi.

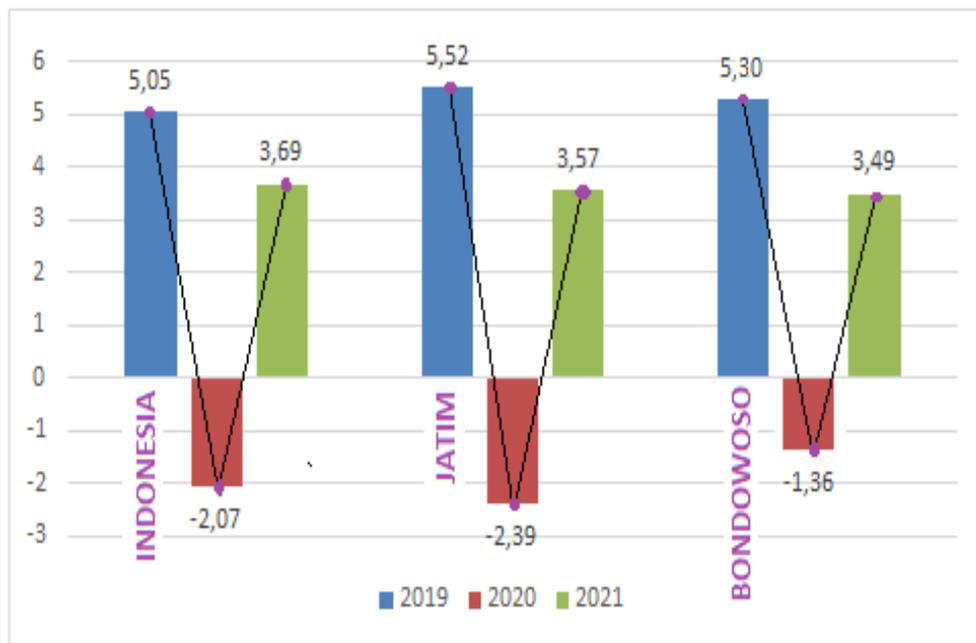
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2021 tumbuh positif pada angka 3,57 persen setelah tahun 2020 mengalami kontraksi 2,33 persen. Pemulihan perekonomian Jawa Timur selama tahun 2021 didorong oleh adanya pelonggaran aktivitas sehingga meningkatkan permintaan dan konsumsi. Realisasi APBD Tahun 2021 meningkat pada belanja barang dan jasa (4,7%) serta belanja modal (35,3%). Belanja bantuan sosial naik 64% karena adanya realisasi bantuan penanggulangan kemiskinan dan jaminan sosial.

Adanya peningkatan ekspor luar negeri Jawa Timur terutama pada ekspor barang, diantaranya adalah perhiasan, tembaga, kayu dan barang dari kayu, dan bahan kimia organik serta ditunjang peningkatan impor luar negeri memberikan sinyal atas perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur selama tahun 2021. Selain



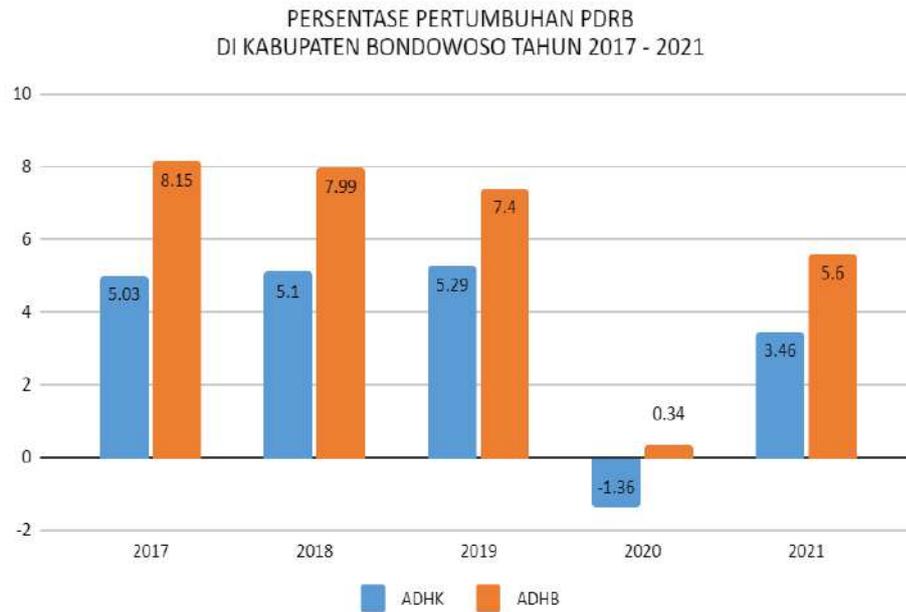
itu seiring meningkatnya beberapa komoditi utama di Jawa Timur seperti mesin-mesin, besi dan baja, pupuk, plastik dan barang dari plastik dan sebagainya.

Perbaikan ekonomi nasional dan regional Jawa Timur berimbas kepada perbaikan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bondowoso. Nilai total PDRB Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 mencapai Rp.21.052,23 milyar meningkat dari tahun 2020 yang mencapai Rp.19.935,59 Milyar. Pertumbuhan ekonomi positif terjadi pada semua sektor ekonomi. Secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi meningkat pada angka 3,49 persen pada tahun 2021 meskipun kondisi pandemi covid 19 masih berlangsung.



Grafik 1.6

**Pertumbuhan Ekonomi 2019-2021**



**Grafik 1.6 Pertumbuhan PDRB**

Selama kurun waktu 3 tahun, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bondowoso mengalami fluktuasi yang dikarenakan kondisi pandemi covid. Perekonomian Bondowoso tumbuh secara positif dari 5,30 persen pada tahun 2019 menurun mencapai angka -1,36 persen bertepatan dengan merebaknya virus corona pada tahun 2020 dan meningkat kembali menjadi 3,49 persen pada tahun 2021 seiring dengan pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah dengan berbagai kebijakan fiskal serta dukungan pemerintah daerah.

Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku menurut Lapangan Usaha tahun 2021 diketahui sebesar 21.052,23 miliar rupiah dan PDRB Menurut harga konstan tahun 2021 sebesar 13.921,65 miliar rupiah. Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha di Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021 mengalami penurunan disebabkan pandemi Covid-19, namun tidak semua kategori mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan 12,37 persen, pertumbuhan kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 6,85 persen sementara kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor di urutan ketiga dengan 6,43 persen. Selanjutnya yang mengalami laju pertumbuhan terendah



ditempati oleh lapangan usaha kategori konstruksi yang mencapai 0,38 persen, sektor kategori lain mengalami kenaikan dan penurunan cukup bervariasi.

Tabel 1.2

**PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)  
Tahun 2019-2021**

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	5.802,12	5.946,49	6.204,93	3.682,96	3.729,46	3.818,35
2	Pertambangan dan Penggalian	388,31	373,69	388,06	269,79	252,97	257,49
3	Industri Pengolahan	4.630,56	4.762,09	5.140,41	3.224,57	3.235,13	3.358,39
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,47	8,59	9,01	6,78	6,78	6,94
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	13,77	14,50	15,68	10,91	11,35	12,06
6	Konstruksi	1.918,21	1.822,06	1.852,41	1.175,34	1.103,62	1.107,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	3.065,57	2.879,94	3.136,50	2.234,87	2.050,86	2.182,66
8	Transportasi dan Pergudangan	146,86	141,96	158,08	106,27	101,09	113,59
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	151,80	125,73	132,78	100,51	82,23	84,00
10	Informasi dan Komunikasi	1.023,25	1.110,70	1.188,01	899,76	974,90	1.041,68
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	573,74	575,49	596,56	396,98	395,12	399,27
12	Real Estat	226,83	238,22	243,67	168,73	173,40	175,91
13	Jasa Perusahaan	76,93	73,42	76,35	50,50	46,84	47,61
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	682,33	697,42	697,89	448,57	437,46	440,13
15	Jasa Pendidikan	693,87	724,71	741,71	505,75	518,54	529,62
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	142,45	156,88	167,71	107,66	116,62	121,78
17	Jasa Lainnya	323,76	283,69	302,49	250,52	215,39	224,39
	Jumlah	19.868,81	19.935,59	21.052,23	13.640,46	13.451,77	13.921,65

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022



Tabel 1.3

**Laju Pertumbuhan dan Sumber Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (persen)  
Tahun 2019 – 2021**

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan Tahun Dasar 2020		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	3,15%	2,49%	4,35%	1,21%	1,26%	2,38%
2	Pertambangan dan Penggalian	4,93%	-3,76%	3,84%	2,44%	-6,24%	1,79%
3	Industri Pengolahan	10,94%	2,84%	7,94%	8,62%	0,33%	3,81%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,07%	1,37%	4,94%	5,83%	0,09%	2,34%
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang	6,47%	5,26%	8,16%	4,72%	3,96%	6,31%
6	Konstruksi	7,52%	-5,01%	1,67%	5,91%	-6,10%	0,38%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	9,05%	-6,06%	8,91%	6,33%	-8,23%	6,43%
8	Transportasi dan Pergudangan	10,84%	-3,33%	11,35%	8,31%	-4,87%	12,37%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,84%	-17,18%	5,61%	7,97%	-18,18%	2,15%
10	Informasi dan Komunikasi	9,06%	8,55%	6,96%	7,58%	8,35%	6,85%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,12%	0,31%	3,66%	3,97%	-0,47%	1,05%
12	Real Estat	7,73%	5,02%	2,29%	5,32%	2,77%	1,44%
13	Jasa Perusahaan	9,15%	-4,56%	3,99%	6,27%	-7,26%	1,65%
14	Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial	10,96%	2,21%	0,07%	3,83%	-2,48%	0,61%
15	Jasa Pendidikan	9,48%	4,45%	2,35%	7,69%	2,53%	2,14%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06%	10,14%	6,90%	6,38%	8,32%	4,43%
17	Jasa Lainnya	7,56%	-12,37%	6,62%	6,44%	-14,02%	4,18%
	Jumlah	7,40%	0,34%	5,60%	5,29%	-1,36%	3,49%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh menurut lapangan usaha pada tahun 2021 mengalami peningkatan meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung, Semua kategori mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha kategori transportasi dan pergudangan 12,37 persen, pertumbuhan kedua adalah informasi dan komunikasi sebesar 6,85 persen sementara kategori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda



Motor di urutan ketiga dengan 6,43 persen. Selanjutnya yang mengalami laju pertumbuhan terendah ditempati oleh lapangan usaha kategori konstruksi yang mencapai 0,38 persen, sektor kategori lain mengalami kenaikan dan penurunan cukup bervariasi.

### 3. PDRB perkapita

PDRB per kapita adalah nilai produksi ( Produk Domestik Regional Bruto) yang dihasilkan oleh setiap penduduk setiap tahun. PDRB per kapita merupakan indikator pendekatan terhadap pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB per kapita Kabupaten Bondowoso terus meningkat seiring dengan peningkatan PDRB Kabupaten Bondowoso baik atas dasar harga berlaku maupun konstan. Adapun PDRB secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 1.4**  
**PDRB perkapita Kabupaten Bondowoso**  
**Tahun 2019 – 2021**

No	Uraian PDRB Per kapita	Tahun		
		2019	2020	2021
1	2	3	4	5
1	ADHB (Rp)	25.614.000	25.685.198,89	27.041.170,20
2	ADHK (Rp)	17.585.000	17.331.383,39	20.305.031,86

Sumber:Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Bondowoso untuk ADHB terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 2019-2021 sedangkan PDRB ADHK perkapita penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 dan meningkat kembali pada tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang mengalami kontraksi akan berpengaruh pada tingkat produksi dan distribusi komoditi yang ada pada sektor PDRB. Kondisi ini akan memberikan pengaruh kepada tingkat produksi pelaku usaha yang mengalami penurunan sehingga tingkat capaian PDRB per kapita akan menurun dibanding tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah akan melakukan evaluasi terhadap tingkat capaian PDRB per kapita masyarakat dan menyesuaikan target pencapaian PDRB per kapita untuk tahun berikutnya.



#### 4. Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisien Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan.

**Tabel 1.5**  
**Indek Gini Kabupaten Bondowoso 2016-2021**

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
1	Gini Rasio	0,35	0,32	0,302	0,329	0,334

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2022

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio Gini (Gini Ratio) sepanjang tahun 2021 di Kabupaten Bondowoso mengalami kenaikan menjadi 0,334 . Selama pandemi tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan khususnya pada lapisan bawah sehingga tingkat pengeluaran semakin kecil. Peningkatan angka rasio gini berkorelasi dengan peningkatan angka kemiskinan.

#### 5. Persentase Penduduk Miskin

Tingkat kemiskinan yang digunakan sebagai indikator makro adalah kemiskinan yang dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur darisisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

**Tabel 1.6**  
**Tingkat Kemiskinan Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Tingkat kemiskinan	15,00	14,54	14,39	13,33	14,17	14,73

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022



Persentase kemiskinan di Bondowoso pada tahun 2021 menunjukkan hasil yang meningkat pada level 14,73% dengan adanya pandemic covid 19. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS), selama periode Maret 2020-Maret 2021, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso bertambah sebanyak 4,93 ribu jiwa dari 110,24 ribu jiwa pada Maret 2020 menjadi 115,18 ribu jiwa pada Maret 2021 atau mengalami peningkatan sebesar 4,47 persen. Berdasarkan persentase penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dalam rentang waktu satu tahun, tersebut mengalami peningkatan sebesar 3,95 persen, dari 14,17 persen pada Maret 2020 menjadi 14,73 persen pada Maret 2021.

#### 6. Tingkat Pengangguran Terbuka

Data Sakernas Agustus 2021, tingkat pengangguran penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bondowoso mencapai 4,46 persen dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 73,89 persen. Meningkatnya pengangguran merupakan dampak nyata dari pandemi Covid-19 yang saat ini melanda dunia. Adapun data ketenagakerjaan secara rinci sebagai berikut:

**Tabel 1.7**  
**Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2021**

No	Rincian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
1	Usia Kerja	610.972	615.757	628.608	632.700
2	Angkatan Kerja	436.530	466.822	472.018	467.488
3	Bukan angkatan Kerja	174.442	148.935	156.590	165.212
4	Bekerja	419.497	453.025	452.545	446.653
5	Pengangguran Terbuka	17.033	13.797	19.473	20.835
6	Tingkat pengangguran Terbuka	3,90 %	2,96%	4,13%	4,46%
7	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		75,81%	75,09%	73,89%

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Badan Pusat Statistik mencatat selama masa pandemi covid 19 terdapat sebanyak 29,12 juta penduduk Indonesia terdampak covid-19. Lebih dari 80 persen,



mengalami pengurangan jam kerja dan 2,56 juta orang menjadi pengangguran berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional, per Agustus 2020.

Secara keseluruhan jumlah pengangguran di Indonesia bertambah 2,67 juta orang dalam setahun, menjadi 9,77 juta orang per Agustus 2020. Tingkat pengangguran terbuka meningkat menjadi 7,07 persen.

Jumlah pekerja formal semakin menyusut, paling banyak di sektor industri pengolahan dan konstruksi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan sektor pertanian sehingga tingkat pengangguran jauh lebih tinggi di kota, dibandingkan di desa.

Kondisi pandemi covid 19 juga berpengaruh kepada kondisi angka pengangguran di Bondowoso. Jumlah pengangguran pada tahun 2020 meningkat menjadi 19.473 orang bertambah sebanyak 5.676 orang atau mengalami peningkatan 41,14% dari tahun 2019 yang mencapai 13.797 orang. Tingkat realisasi capaian kinerja TPT tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 16,23% dari target 1,91% terealisasi 4,13%.

**Tabel 1.8**  
**Jumlah penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan**  
**Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2021**

No	Jenis Pekerjaan	Th 2018	Th 2019	Th 2020	Th 2021
1	Pertanian	193.673	125.555	218.713	204.486
2	Industri	73.168	49.096	91.676	87.302
3	Jasa	152.656	278.374	142.156	154.865
	<b>Jumlah</b>	<b>419.497</b>	<b>453.025</b>	<b>452.545</b>	<b>446.653</b>

Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Selama kondisi pandemi covid 19, justru jumlah penduduk bekerja pada sektor pertanian dan industri pengolahan (khususnya UMKM) mengalami penurunan namun kedua sektor ini masih menjadi penyumbang dalam penyediaan lapangan kerja. Sektor jasa yang mengalami penurunan terbesar jumlah tenaga kerja pada tahun 2020, mulai mengalami peningkatan pada tahun 2021 yaitu dari 142.156 orang menjadi 154.865 orang di tahun 2021. Hal ini menunjukkan intervensi program – program pembangunan pada sektor pertanian dan UMKM masih mampu memberikan peluang dan kesempatan kerja kepada masyarakat



selama pandemi covid. Sedangkan pada sektor jasa, seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi juga memberikan dampak positif dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja pada sektor ini.

## 7. Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan ukuran keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM Kabupaten Bondowoso selama kurun waktu 2016-2021 terus mengalami peningkatan.

**Tabel 1.9**  
**Perkembangan IPM Tahun 2016-2021**

No	Uraian	Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indek pembangunan Manusia (IPM)	64,52	64,75	65,27	66,09	66,43	66,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Pembangunan manusia di Kabupaten Bondowoso secara konsisten mengalami kemajuan selama periode 2019-2021. Dari 66,09 (2019) meningkat menjadi 66,59 (2021) atau selama periode tersebut tumbuh 0,24 persen.

**Tabel 1.10**  
**Perkembangan Komponen Pembentuk IPM Tahun 2019-2021**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
1	2	3	4	5
1	Umur Harapan Hidup (UHH)	66,55 th	66,74 th	66,89 th
2	Harapan Lama sekolah (HLS)	13,27 th	13,28 th	13,29 th
3	Rata Lama Sekolah (RLS)	5,71 th	5,93 th	5,94 th
4	Pengeluaran per Kapita (Rp.000,00)	10.665,00	10.610,00	10.690,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, 2022

Selama periode 2019 hingga 2020, komponen pembentuk IPM juga mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki peluang untuk hidup hingga 66,74 tahun, meningkat 0,15 tahun. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,29 tahun, meningkat 0,01 tahun. Sementara itu, penduduk



usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 5,94 tahun, juga meningkat 0,01 tahun. Pengeluaran per kapita yang disesuaikan (harga konstan 2010) telah mencapai Rp.10,690 juta, meningkat Rp. 80 ribu dibandingkan tahun sebelumnya.

## **F. Reformasi Birokrasi**

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023, tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan sejalan dengan prinsip reformasi birokrasi yang tertuang dalam misi 4 (empat), yaitu ***“Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif”***. Maksud dari misi ini adalah mewujudkan kualitas pelayanan yang semakin baik terhadap kebutuhan masyarakat, tanpa adanya pembatasan/ diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan serta penyelenggaraan pemerintahan secara akuntabel, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan.

Berlandaskan pada misi tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Bondowoso berkomitmen untuk melakukan Reformasi Birokrasi. Komitmen dalam Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Bondowoso berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020 - 2024.

Pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak tahun 2010 melaksanakan sebagian agenda program reformasi birokrasi melalui penerapan dan pengembangan berbagai sistem aplikasi untuk meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :



Tabel 1.11. Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Bondowoso

No	Nama Sistem Aplikasi
1	Sistem Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik ( LPSE )
2	Sistem Informasi Keuangan ( SIMDA Keuangan Ver 29.08 )
3	Sistem Informasi Barang Milik Daerah ( Simda BMD )
4	Sistem Informasi Manajemen Pegawai ( SIMPEG )
5	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ( SIAK )
6	Sistem Informasi Rekam Dokumen ( REDOK )
7	Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur ( SIPIJAR )
8	Aplikasi Informasi Kedisiplinan ASN ( SINKA )
9	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ( LPPD )
10	Sistem Informasi Pemerintah Daerah ( SIPD )
11	Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Online ( SIAPO )
12	Sistem Administrasi Informasi Desa ( SAID )
13	Sistem Informasi Pengelolaan Karpeg, Pensiun, Karis, Karsu ( KERIS )
14	Sistem Informasi Administrasi Kepegawaian berbasis Paperless Digital ( SITAPELEGIT )
15	Sistem Informasi Manajemen Objek Pajak PBB ( SISMIOP )
16	Sistem Informasi Manajemen BPHTB ( E-BPHTB )
17	Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya ( SIMPADA )
18	Sistem Informasi Pajak Daerah Lainnya ( E-SPTPD )
19	Sistem Informasi Layanan Satu Peta ( Satu Peta )
20	Sistem informasi penggunaan pupuk organik ( ELABONIC )
21	Sistem Monitoring dan Tim Evaluasi Pengawasan Anggaran ( SISMONTEPRA )
22	Sistem Informasi Produk Hukum Daerah ( JDIH )
23	Sistem Informasi Bantuan Keuangan ( SIBUK )
24	Sistem Informasi Anjab dan ABK ( SIAB )
25	Sistem Informasi Promosi Pariwisata Bondowoso ( Web Promo )
26	Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Digital ( TIC )
27	Sistem Informasi Majalah Digital Pariwisata Bondowoso ( BWO Magazine )
28	Sistem Informasi Penerbitan Rekomendasi Perizinan Usaha Pariwisata Bondowoso ( SIAP PAK )
29	Aplikasi SI PENDEKAR ( SIPENDEKAR )
30	Sistem Informasi Barang Persediaan ( SiBaper )
31	Sistem Informasi Gaji ASN ( SIMGAJIWEB )
32	Sistem Informasi Pelaporan Gaji ( SIKDCORE )
33	Sistem Informasi Dana Transfer Daerah ( SIMTRADA )
34	Sistem Informasi Rekonsiliasi ( SiRekon )
35	Sistem Informasi Izin Praktek Tenaga Kesehatan ( SIPNAKES )
36	Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah ( ARKAS )
37	Aplikasi Penyaluran Dana BOS ( BOS Salur )



No	Nama Sistem Aplikasi
38	Sistem Informasi Data Pokok Pendidikan ( DAPODIK )
39	Sistem Informasi Program Indonesia Pintar ( SIPINTAR )
40	Sistem Laporan Desa ( SILAPDES )
41	Aplikasi Register Pindah Datang ( REPINDAT )
42	Aplikasi Cek Data Penduduk ( CEK DATA )
43	Sistem Informasi Kesehatan Daerah ( SIKDA )
44	Sistem Informasi Ibu dan Bayi ( SIBUBA )
45	Sistem Informasi Public Safety Center ( PSC 119 )
46	Sistem Informasi Bayi Dua Tahun ( e-SIP Baduta )
47	Sistem Informasi Surat Keluar Masuk Berbasis Elektronik ( e-Surat )
48	Aplikasi Pemesanan Aula ( Aula Dinkes )
49	Sistem Informasi Persediaan Obat ( SistemInformasiPersediaan )
50	Aplikasi SIPP
51	Aplikasi Sistem Monitoring Menara ( SIMONA )
52	Aplikasi SISEDAP
53	Sistem Informasi Manajemen UMKM Daerah ( SIMUDA )
54	Sistem Informasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ( PMPRB )
55	Sistem Informasi Evaluasi dan Monitoring Renja ( e-Monev )
56	Sistem Informasi Pengelolaan Database Jalan Daerah SiPDJD
57	Sistem Informasi Standar Pelayanan Minimal ( SPM )
58	Aplikasi Petugas OP Irigasi untuk Pengelolaan Irigasi Modern dan Baik ( e-Paksi )
59	Sistem Informasi Ketenagakerjaan Kabupaten Bondowoso ( SIKERJA )
60	Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan ( SIMTendik )
61	Sistem Informasi Manajemen Uji Kompetensi Kepala Sekolah ( SIM UKKS )
62	Sistem Informasi Kearsipan Daerah ( SIKD )
63	Sistem Pengelolaan Perpustakaan yang terintegrasi ( INLIS )
64	Sistem Informasi Jejaring Pasar Rakyat SIJEPRAK )
65	Sistem Informasi Rekomendasi Ijin Perpanjangan Operasional Sekolah ( OSS )
66	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa ( SISKEUDES )
67	Aplikasi Laporan SPM ( SPM )
68	Sistem Informasi Pendataan Asesmen Nasional ( BIOUNSMP )
69	Sistem Informasi Pendataan Asesmen Nasional ( BIOSD )
70	Sistem Informasi Pemetaan Satuan Pendidikan ( ANBK )
71	Online Data System ( ODS )
72	Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generations ( SIKS NG )
73	Sistem Informasi e-Program Keluarga Harapan ( e-PKH )
74	Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ( SIM RS )
75	Sistem Informasi Surat Menyurat ( AMANAR )
76	Sistem Informasi Presensi Online ( AbsensiOnline )
77	Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan ( SI PERKASA )



No	Nama Sistem Aplikasi
78	Sistem Informasi Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba ( GERDU BERSINAR )
79	Sistem Informasi Pengaduan Gerakan Terpadu Berantas Kemaksiatan dan Narkoba ( Pelayanan Pengaduan Gerdu Bersinar )
80	Sistem Informasi Satpol PP ( SIM-POLPP )
81	Sistem Informasi Pelayanan Pengaduan Masyarakat (SIP)
82	Sistem Informasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP )
83	Aplikasi Jabatan Fungsional ( siJafung )
84	Aplikasi e-Absensi ( e-Absensi )
85	Sistem Informasi Industri IKM ( SI INDUS )
86	Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran ( KRISNA )
87	Sistem Informasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara ( OMSPAN )

Sumber : Arsitektur SPBE, tahun 2021

Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus mengembangkan pemanfaatan berbagai aplikasi baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten Bondowoso sendiri untuk mendukung kemudahan penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Terdapat 87 aplikasi yang eksisting dimana 57,5% (50 aplikasi) merupakan domain aplikasi khusus yang terdapat pada Perangkat Daerah, dan 42,5% (37 aplikasi) merupakan domain aplikasi umum yang dapat digunakan di Perangkat Daerah. Untuk Sistem Operasi aplikasi sendiri, sebanyak 77,2% (78 aplikasi) merupakan sistem operasi windows, sebanyak 18,8% (19 aplikasi) merupakan sistem operasi Android, dan sistem operasi Linux sebanyak 4,0% (4 aplikasi)

Untuk platform aplikasi yang digunakan untuk saat ini adalah yang pertama platform web sebanyak 77,8% (77 aplikasi), dilanjut dengan platform mobile sebanyak 19,2% (19 aplikasi) dan yang ketiga adalah platform desktop dengan jumlah sebanyak 3,0% (3 Aplikasi). Untuk 62 Area Aplikasi penyesuaian dengan Standar Nasional, dimana 12.6% (11 Aplikasi) merupakan Aplikasi Layanan Publik, dilanjut 29.9% (26 Aplikasi) merupakan Aplikasi Administrasi Pemerintahan, dilanjut 5.7% (5 Aplikasi) merupakan Aplikasi Misi Tertentu, dan 51.7% (45 Aplikasi) merupakan Aplikasi Fungsi Tertentu di Perangkat Daerah.



Beberapa sistem aplikasi yang sudah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso antara lain, sistem layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE) yang diaplikasikan sejak tahun 2012 dapat diakses melalui <http://lpse.bondowosokab.go.id/eproc>.



**Gambar 1.19. LPSE Kabupaten Bondowoso**

Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga telah menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) dalam rangka menertibkan dan meningkatkan pengawasan serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

Sistem aplikasi SIMDA telah diterapkan secara online oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan seluruh PERANGKAT DAERAH, sehingga proses usulan, penatausahaan sampai dengan pertanggungjawaban realisasi anggaran dapat dilakukan secara online.



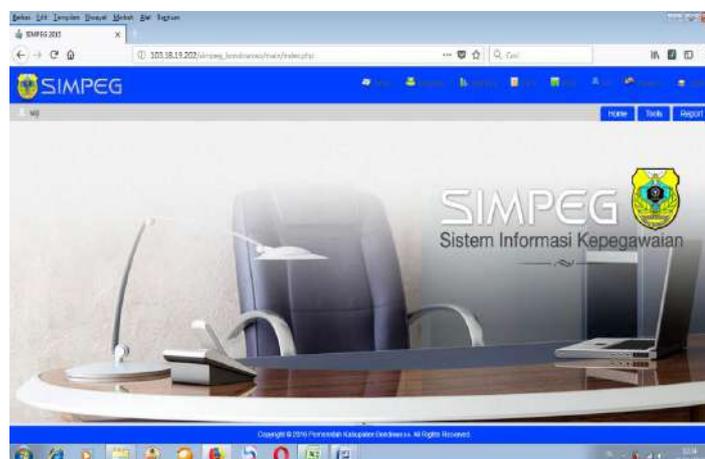
**Gambar 1.20. SIMDA Keuangan Kabupaten Bondowoso**



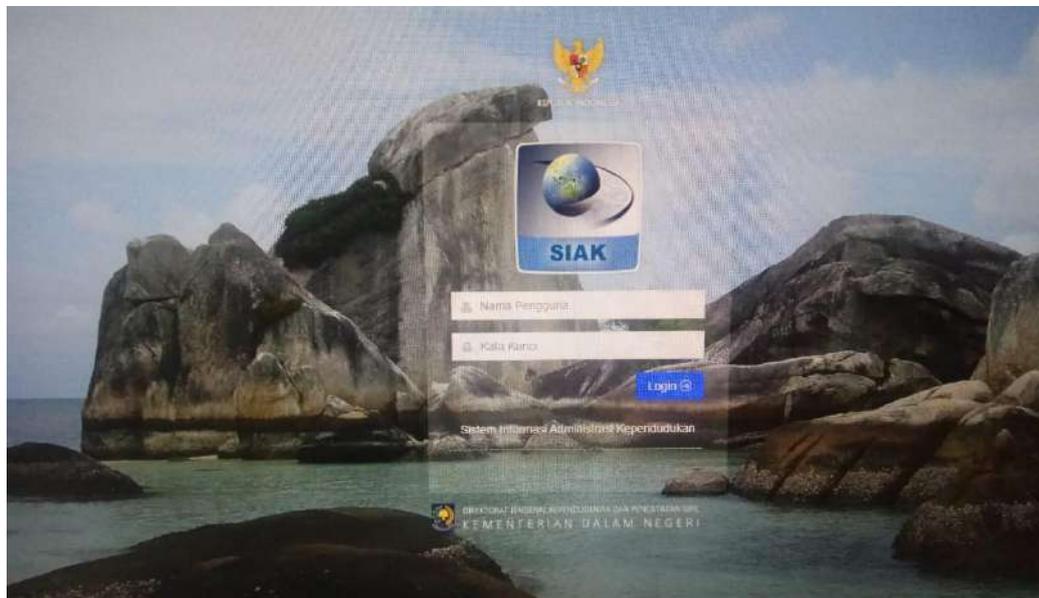
Gambar 1.21. SIMDA BMD Kabupaten Bondowoso

Penataan administrasi pengelolaan aset milik daerah, terus dilakukan melalui penerapan dan pengembangan aplikasi Sistem Manajemen Barang Milik Daerah (SIMDA BMD). Aplikasi SIMDA BMD bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset milik daerah, sehingga posisi aset daerah akan selalu update dalam neraca aset daerah. Selain itu, aplikasi ini berguna untuk kontrol dan pengawasan terhadap semua aset milik daerah.

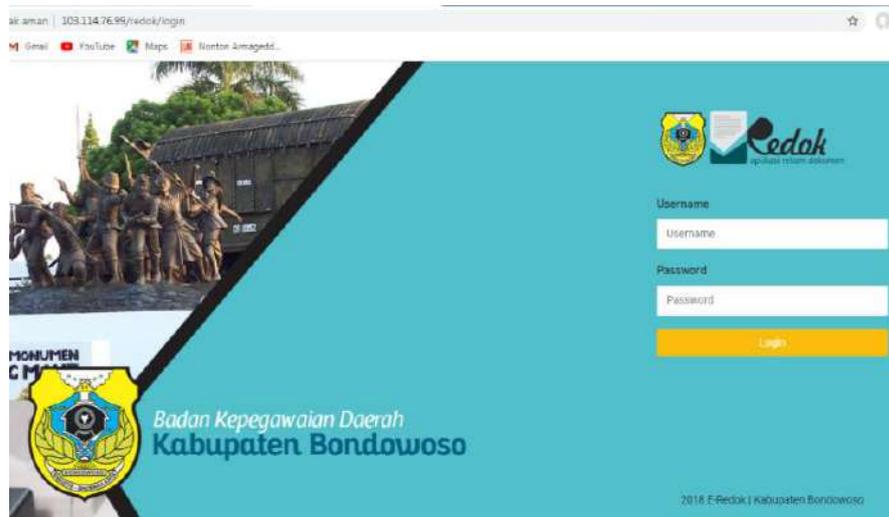
Aplikasi pendukung kinerja penyelenggaraan pelayanan yang lain adalah Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) yang dimaksudkan untuk membantu kelancaran administrasi kepegawaian dalam rangka pelayanan kepegawaian, dan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan proses pengelolaan administrasi kependudukan dalam rangka pelayanan kependudukan.



Gambar 1.22. SIMPEG Kabupaten Bondowoso

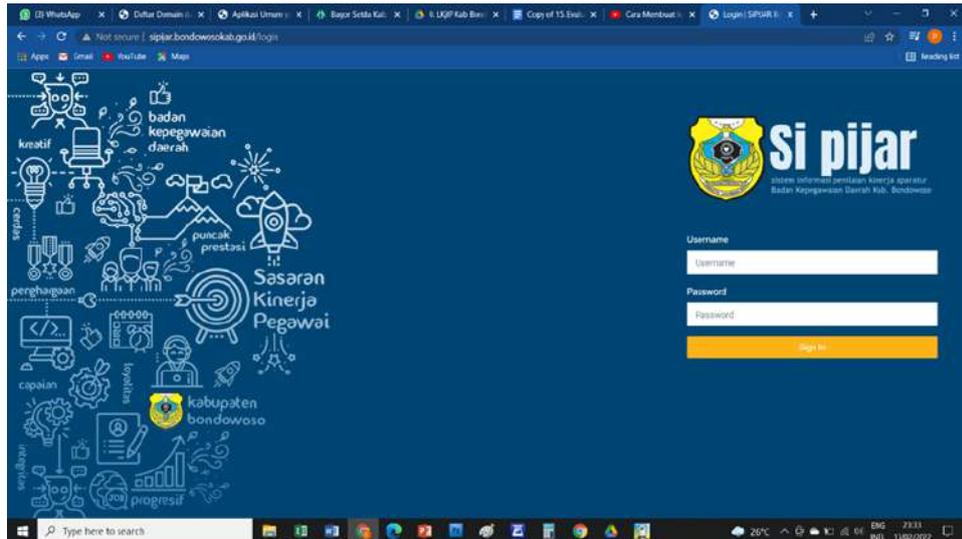


Gambar 1.23. SIAK Kabupaten Bondowoso



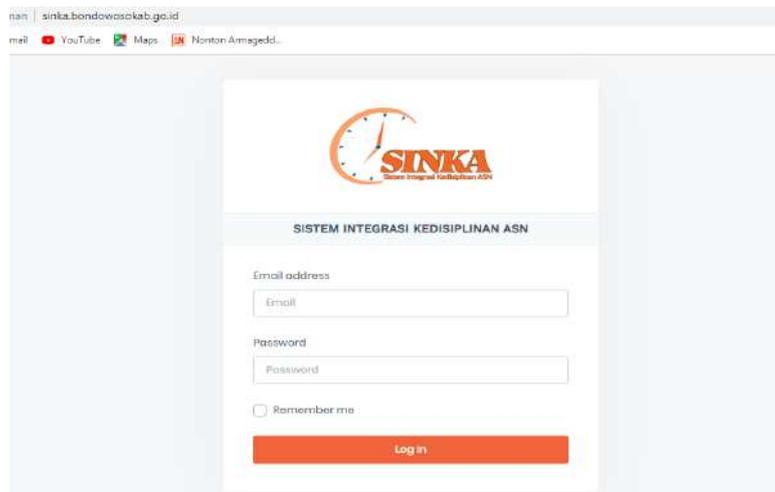
Gambar 1.23. Redok Kabupaten Bondowoso

Layanan penyimpanan berkas kepegawaian secara online diimplementasikan dengan Aplikasi Rekam Dokumen (REDOK), hal ini bertujuan untuk memperlancar layanan kepegawaian dari BKD kepada Aparatur Sipil Negara.



**Gambar 1.24. Si Pijar Kabupaten Bondowoso**

Implementasi E-Government diharapkan akan berpengaruh terhadap peningkatan kualitas ASN dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan Penerapan Pengelolaan Kepegawaian Berbasis Aplikasi. Kabupaten Bondowoso meluncurkan aplikasi e-KINERJA ( Sistem Informasi Penilaian Kinerja Aparatur ) yang dapat Mengukur dan Menilai Kinerja ASN secara Terpadu sehingga aktifitas dan pekerjaan pegawai negeri sipil (PNS) sesuai dengan tingkat Kinerjanya.



**Gambar 1.25. SINKA Kabupaten Bondowoso**

Upaya peningkatan kedisiplinan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Bondowoso diimplementasikan melalui aplikasi Sistem Integrasi Kinerja ASN (SINKA) yang terintegrasi dengan absensi elektronik fingerprint dan iris

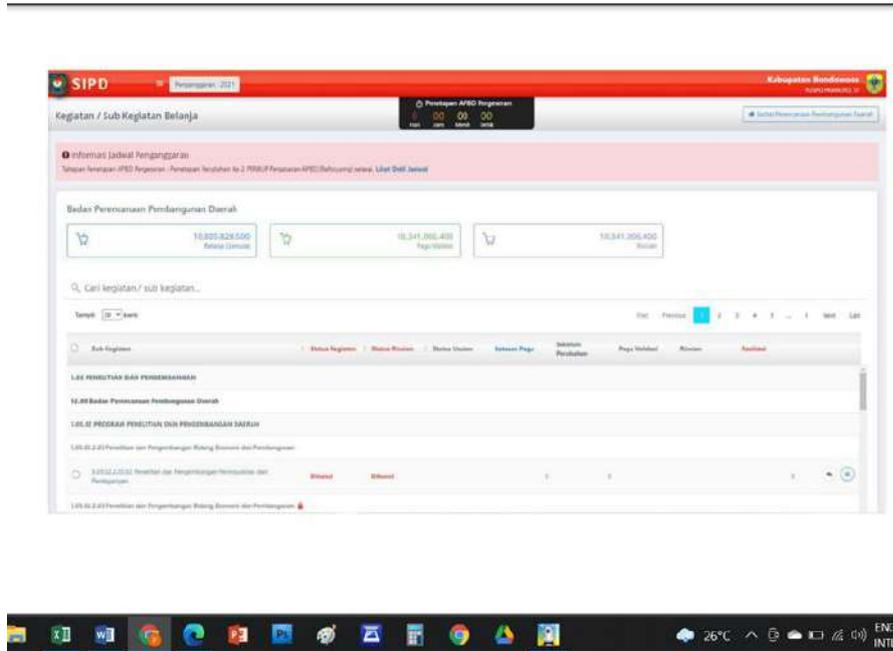


mata. Aplikasi SINKA ini merupakan aplikasi pengelola TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), yang telah terintegrasi dengan absensi elektronik, atau fingerprint yang ada di tiap-tiap Perangkat Daerah. Dengan aplikasi tersebut, absensi digital juga berfungsi untuk merekam tingkat keterlambatan ASN, beserta berapa potongan rupiah yang didendakan.



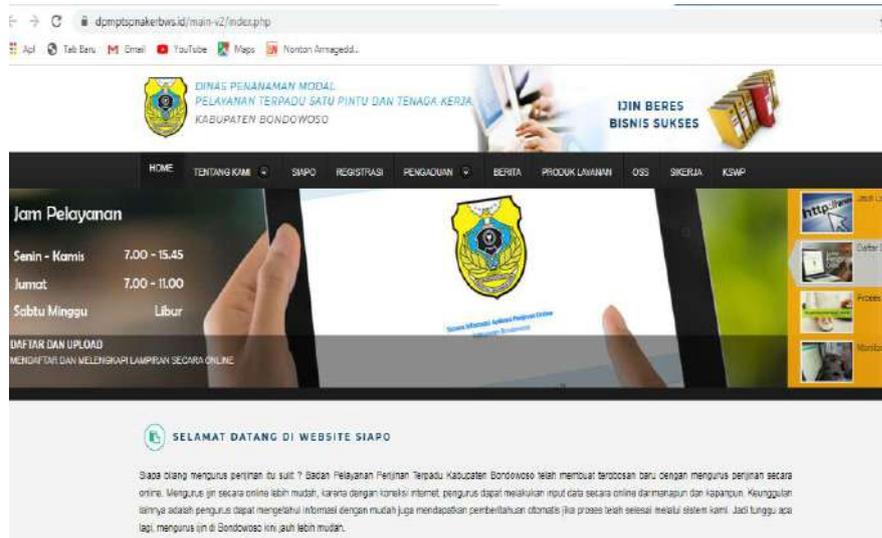
**Gambar 1.26. SIM LPPD Kabupaten Bondowoso**

Sistem Informasi Manajemen Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SIM LPPD) merupakan suatu aplikasi berbasis web yang mengelola laporan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dirancang khusus untuk mempermudah pengisian dan penyajian pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala Daerah berkewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat. Tindak lanjutnya telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007, yang mengatur teknis penyusunan dan penyampaiannya. SIM LPPD terdiri dari dua menu utama, yaitu: 1) ILPPD Berisi informasi hasil LPPD pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat diakses oleh masyarakat dan 2) LPPD Aplikasi untuk mengelola LPPD pada tahun yang sedang berjalan.



**Gambar 1.27. SIMDA Perencanaan Kabupaten Bondowoso**

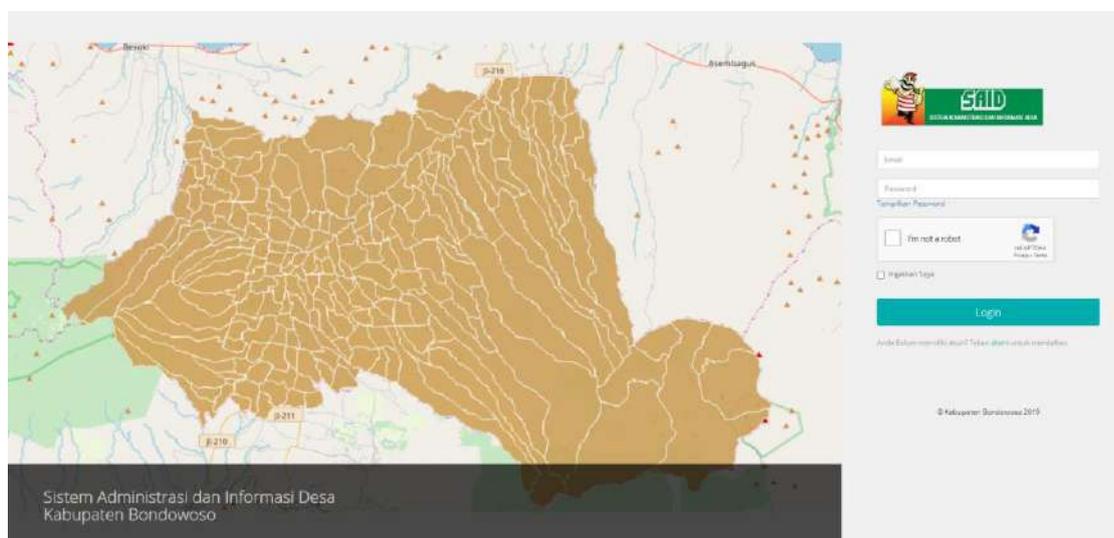
Aplikasi SIMDA Perencanaan (SIPD) adalah sebuah aplikasi penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017. Dengan adanya alat bantu e-planning, BAPPEDA dapat memaksimalkan sistem dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.



**Gambar 1.28. SIAPO Kabupaten Bondowoso**



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso telah membuat terobosan baru dengan mengurus perijinan secara online. Mengurus ijin secara online lebih mudah, karena dengan koneksi internet, pengurus dapat melakukan input data secara online darimanapun dan kapanpun. Keunggulan lainnya adalah pengurus dapat mengetahui informasi dengan mudah juga mendapatkan pemberitahuan otomatis jika proses telah selesai melalui Sistem Informasi Aplikasi Perijinan Online (SIAPO).



**Gambar 1.30. SAID Kabupaten Bondowoso**

Guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang baik, Pemerintah Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur telah menyiapkan aplikasi mutakhir bernama Sistem Administrasi dan Informasi Desa (SAID), SAID merangkum data kependudukan, data kemiskinan, hingga informasi terupdate yang terjadi di desa.

Berbagai upaya Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik membuahkan berbagai bentuk prestasi dan penghargaan. Prestasi dan penghargaan tersebut meliputi berbagai bidang, baik di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di tingkat Nasional, antara lain :



Tabel 1.12. Prestasi dan Penghargaan Kabupaten Bondowoso

No	Nama Penghargaan	Tingkat	Tahun
1	Top 99 Inovasi Pelayanan Kesehatan “Bunda Kespro”	Nasional	2016
2	Pengelola PAUD Terbaik Nomor 2 Nasional	Nasional	2016
3	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2015	Nasional	2016
4	Juara 2 Perpustakaan Sekolah Terbaik	Prov. Jatim	2016
5	Top Pembina BUMD 2016	Nasional	2016
6	Top BUMD 2016	Nasional	2016
7	Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Terbaik	Nasional	2016
8	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2016	Nasional	2017
9	Operasi dan Pemeliharaan (OP) Irigasi Terbaik	Nasional	2017
10	Predikat Kabupaten Layak Anak	Nasional	2017
11	Pelayanan Kepegawaian Terbaik Tipe A	BKN Reg II	2017
12	POSYANDU Terbaik Nasional	Nasional	2017
13	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2016	Nasional	2017
14	APPK Terbaik se-Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	Prov Jatim	2017
15	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2017	Nasional	2018
16	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2017	Nasional	2018
17	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2018	Nasional	2019
18	Bondowoso Peduli HAM	Nasional	2019
19	Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2019.	Nasional	2019
20	Penghargaan Swasti Saba Sistara	Nasional	2019
21	Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2019	Nasional	2020
22	Opini WTP Laporan Keuangan TA 2019	Nasional	2020
23	SAKIP RB Award 2020	Nasional	2021
24	Raih Nilai SAKIP BB 2020	Nasional	2021
24	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 Kali Berturut-Turut	Prov Jatim	2021
25	Penghargaan Kota Layak Anak Katagori Pratama (KLA)	Nasional	2021



No	Nama Penghargaan	Tingkat	Tahun
26	Penghargaan Forum Inspirasi Kecamatan Cettar Untuk Jatim Bangkit (Inovasi Sibuba dan Tape Manis)	Prov Jatim	2021
27	Capaian WTP Berturut-Turut tanpa terputus dengan kategori 10 tahun dan 5 tahun terhadap Laporan Keuangan TA 2020	Prov Jatim	2021
28	Penghargaan dalam kategori Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan LH Daerah (DIKPLHD)	Prov Jatim	2021
29	Penghargaan Sekolah Adi-wiyata Tingkat Provinsi Jawa Timur	Prov Jatim	2021
30	Penghargaan Kategori Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup (PFLH)	Prov Jatim	2021
31	Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2021	Prov Jatim	2021

**Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi, Tahun 2021**



Gambar 1.23. Meraih Predikat “BB” Penilaian SAKIP Tahun 2019

Pemerintah Kabupaten Bondowoso kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke tujuh kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Timur. Pada Tahun 2021 Bupati Bondowoso didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso berkenan memenuhi undangan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten Bondowoso TA 2020

Selain itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso juga berhasil Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2021 dari Ombudsman Republik Indonesia di Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur.



Gambar 1.24. Penghargaan dari Ombudsman RI



**Gambar 1.25. Penghargaan Kabupaten Sehat**



**Gambar 1.25. Penghargaan Inovasi Sibuba dan Tape Manis**

Inovasi pelayanan warga kurang mampu yaitu Aplikasi Sistem Informasi Ibu dan Bayi (Sibuba) dan gerakan Tanggap Peduli Warga Miskin (Tape Manis). Dua inovasi layanan dasar kesehatan dan penanganan warga miskin ini menghantar kabupaten bondowoso berjuluk kota tape mendapat penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa, tanggal 24 September 2021.



Wakil Bupati bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat menjelaskan penghargaan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar parawansa, karena bondowoso berhasil menelurkan dan melaksanakan inovasi aplikasi sibuba dan tape manis yang berdampak pada peningkatan kualitas layanan dasar kesehatan dan penanganan warga miskin dengan pengembangan ekonomi lokal dan kewirausahaan.



**Gambar 1.25. Penghargaan Capaian WTP Berturut-Turut tanpa terputus dengan kategori 10 tahun dan 5 tahun terhadap Laporan Keuangan TA 2020**

Pemkab Bondowoso Jawa Timur tujuh kali secara berturut turut mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan. Sertifikat WTP tersebut diberikan Gubernur Jawa Timur kepada Bupati Bondowoso, KH Salwa Arifin, di Hotel Kokoan, Banyuwangi, Jumat (29/10/2021)

Bupati Salwa Arifin mengapresiasi kinerja seluruh OPD atas Penyusunan Laporan Keuangan Daerah tahun 2020. Menurutnya, penyerahan sertifikat dan plakat anugerah penghargaan pemerintah provinsi diberikan kepada pemerintah daerah yang dapat mempertahankan capaian WTP berturut turut tanpa terputus sejak tahun 2006.



## G. Profil Sumberdaya Aparatur

Struktur dan komposisi aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2021, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.13. Komposisi Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2020

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil	
		PNS	Kontrak
1	SD / MI	65	-
2	SMP/ MTs	187	-
3	SMA / SMK / MA	1,780	21
4	Diploma 1 (D-1)	8	-
5	Diploma 2 (D-2)	273	-
6	Diploma 3 (D-3)	624	3
7	Diploma 4 (D-4)	154	-
8	Sarjana Srata 1 (S-1)	4,217	288
9	Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	317	-
10	Doktoral (S-3)	2	-
<b>Jumlah</b>		<b>7.627</b>	<b>312</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2021 (Tidak termasuk CPNS)

Tabel 1.14. Komposisi PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kualifikasi Agama	Jumlah PNS		Jumlah PPK		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Budha	-	4	-	-	4
Hindu	6	7	-	-	13
Islam	4,196	3,323	162	150	7,831
Katolik	6	14	-	-	20
Kristen	23	48	-	-	71
Jumlah per Jenis Kelamin	4,231	3,396	162	150	7,939
<b>JUMLAH</b>	<b>7,627</b>		<b>312</b>		<b>7,939</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2021 (Tidak termasuk CPNS)



Tabel 1.15. Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Tahun 2021

Golongan / Ruang	ESELON			NON ESELON			PELAKSANA	JUMLAH
				TENAGA FUNGSIONAL				
	II	III	IV	*PEND	*KESH	LAIN		
I / b	0	0	0	0	0	0	1	1
I / c	0	0	0	0	0	0	19	19
I / d	0	0	0	0	0	0	110	110
Golongan I (Juru)	0	0	0	0	0	0	130	130
II / a	0	0	0	0	0	7	99	106
II / b	0	0	0	7	1	17	338	363
II / c	0	0	0	27	65	20	305	417
II / d	0	0	0	67	65	1	709	842
Golongan II (Pengatur)	0	0	0	101	131	45	1,451	1,728
III / a	0	0	11	331	92	59	589	1,082
III / b	0	0	46	626	170	26	243	1,111
III / c	0	4	98	514	226	13	41	896
III / d	0	37	228	365	174	18	52	874
Golongan III (Penata)	0	41	383	1,836	662	116	926	3,964
IV / a	4	84	44	441	52	8	3	636
IV / b	12	40	1	1,025	36	16	0	1,130
IV / c	15	0	0	15	6	2	0	38
IV / d	0	0	0	0	1	0	0	1
Golongan IV (Pembina)	31	124	45	1,481	95	25	4	1,805
Gol. IX (PPPK)	0	0	0	261	0	51	0	312
<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>31</b>	<b>165</b>	<b>428</b>	<b>3,679</b>	<b>888</b>	<b>237</b>	<b>2,511</b>	<b>7,939</b>

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, Tahun 2021 (Tidak termasuk CPNS)

## H. Isu Strategis

Setelah melakukan kajian terhadap kondisi Kabupaten Bondowoso dari berbagai aspek pembangunan, dapat dirumuskan beberapa isu strategis Kabupaten Bondowoso. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting bagi keseluruhan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso 2018-2023 karena dari tahap ini akan diketahui apakah tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Kepala Daerah beserta jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan.



Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya, serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi isu strategis Kabupaten Bondowoso 2018-2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan nilai tambah produk pertanian masih belum optimal dalam meningkatkan pendapatan petani karena tingkat efisiensi dalam berusaha tani yang masih rendah.
2. Potensi industri pengolahan khususnya hasil pertanian sebagai pendorong peningkatan PDRB belum dikembangkan secara optimal.
3. Potensi wisata di Kabupaten Bondowoso cukup banyak, pengembangan kawasan wisata berpotensi menggerakkan lapangan usaha yang lain tumbuh pesat. Masih banyak tujuan wisata dan budaya yang bisa dikembangkan untuk menjadi komoditi wisata, serta dapat menggerakkan lapangan usaha lainnya untuk tumbuh.
4. Investasi di Kabupaten Bondowoso dalam periode lima tahun sebelum 2019 nilainya naik, tapi diperlukan peningkatan yang lebih tinggi untuk memacu pertumbuhan ekonomi wilayah pada tahun-tahun berikutnya.
5. Keterbatasan dan kurangnya kadar keberdayaan sektor perekonomian rakyat untuk berkembang secara mandiri akibat kurang dimilikinya akses yang memadai terhadap sumber-sumber produksi dan permodalan, serta pemasaran.
6. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bondowoso dalam periode lima tahun sebelum 2019 terus mengalami penurunan, namun demikian jumlahnya masih cukup banyak meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan.
7. Kondisi yang dihadapi penduduk miskin terkait masih rendahnya akses penduduk miskin terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, berusaha dan permodalan. Selain itu juga keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, rumah layak huni serta kecukupan pangan.
8. Permasalahan pendidikan di Kabupaten Bondowoso adalah rendahnya tingkat pendidikan penduduk dimana angka rata – rata lama sekolah jauh lebih rendah dibanding Provinsi Jawa Timur maupun Nasional.



9. Permasalahan kesehatan di Kabupaten Bondowoso adalah masih rendahnya Angka Harapan Hidup, angka Kematian Ibu (AKI) yang masih perlu diturunkan dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang masih tinggi. Angka stunting yang sangat tinggi, hal ini relevan dengan angka gizi buruk yang terjadi. Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan penerapan PHBS masih belum optimal, serta rendahnya akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi.
10. Masih adanya pernikahan dini yang berakibat kepada resiko tinggi pada kehamilan dan persalinan serta gangguan kesehatan reproduksi yang menyebabkan munculnya permasalahan sosial lainnya seperti meningkatnya perceraian, kemiskinan dan pengangguran.
11. Infrastruktur daerah belum tersedia secara memadai, seperti jalan dan jembatan, jaringan irigasi, air bersih, sanitasi dan drainase, sarana transportasi, serta akses terhadap jaringan komunikasi.
12. Keberdayaan kelembagaan masyarakat desa dan peran sertanya dalam setiap proses pembangunan perlu ditingkatkan lebih lanjut sehingga terbentuk kemandirian desa.
13. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bondowoso menjadi tuntutan dan ekspektasi masyarakat dalam rangka percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
14. Stabilitas ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat merupakan faktor fundamental yang sangat dibutuhkan sebagai syarat agar pelaksanaan pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan hasilnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.



## **I. Sistematika Laporan Kinerja**

Sistematika penyajian laporan kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

### **BAB 1 : Pendahuluan**

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, sejarah singkat Kabupaten Bondowoso, kondisi geografis, data demografi dan kondisi ekonomi, indeks pembangunan manusia, juga profil sumberdaya aparatur, serta sistematika penyajian.

### **BAB 2 : Perencanaan Kinerja**

Memuat rencana strategis daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pencapaian sasaran sesuai Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2019.

### **BAB 3 : Akuntabilitas Kinerja**

Berisi penjelasan singkat tentang pencapaian sasaran strategis, evaluasi dan analisis atas pencapaian kinerja yang diuraikan per sasaran strategis, serta akuntabilitas anggaran tahun 2019.

### **BAB 4 : Penutup**

Berisi ringkasan dan kesimpulan terkait pencapaian kinerja tahun 2018, dengan harapan bermanfaat untuk umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah pada masa mendatang.



## BAB 2

# PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA



### A. Instrumen Pendukung Kinerja

Sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah khususnya terkait dengan tata kelola pemerintah yang baik, bersih, profesional, akuntabel dan transparan, maka Pemerintah Kabupaten Bondowoso membangun berbagai infrastruktur aplikasi sistem pendukung kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi.

Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diterapkan pemerintahan Kabupaten Bondowoso atau yang disebut dengan e-goverment bertujuan agar masyarakat semakin mudah dalam mengakses kebijakan pemerintah, sehingga program yang dirancangan pemerintah dapat berjalan dengan lancar. E-goverment juga dapat mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, dan bisa meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri. Masyarakat dapat memberi masukan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sehingga dapat memperbaiki kinerja pemerintah.

Penerapan aplikasi sistem berbasis teknologi informasi tersebut telah digunakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penggunaan aplikasi sistem secara online selain ditujukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja, serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga mendukung terciptanya inovasi pelayanan publik.



## **B. Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023**

### **1. Visi dan Misi**

Visi adalah pernyataan mengenai keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Visi organisasi yang ditetapkan mesti menjadi visi bersama (shared vision) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumberdaya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan tolok ukur keunggulan, dan menjembatani keadaan sekarang dan masa depan

Berdasarkan kondisi obyektif daerah saat ini, maka Visi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 adalah :

**“TERWUJUDNYA BONDOWOSO MANDIRI EKONOMI,  
LESTARI, SEJAHTERA, ADIL DAN TERDEPAN  
DALAM BINGKAI IMAN DAN TAKWA”**

Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan Dalam Bingkai Iman Dan Takwa adalah kata kunci Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita dan harapan yang ingin diwujudkan.

Visi Pembangunan Kabupaten Bondowoso terdiri dari 5 (lima) kata kunci yaitu: Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, Dalam Bingkai Iman Dan Takwa yang memiliki makna strategis dan mencerminkan cita-cita, harapan yang ingin diwujudkan masyarakat Bondowoso. Visi pembangunan tahun 2018-2023 mengandung pemahaman terjalannya sinergi yang harmonis antara 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan daerah yaitu pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bondowoso dalam mewujudkan cita-cita dan harapan masyarakat.



Secara filosofi, visi pembangunan tahun 2018-2023 dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung pada kata kunci dan pilar misi sebagai berikut:

#### 1. Mandiri Ekonomi

##### Pilar Pembangunan Kemandirian Ekonomi

Adalah terwujudnya kondisi masyarakat Bondowoso yang memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk membangun, dan memelihara kelangsungan hidup dengan mengandalkan kemampuan sendiri secara produktif. Membangun kemandirian ekonomi berarti mengembangkan kemampuan untuk proaktif melepas belenggu ketergantungan dan hambatan struktural dalam mengembangkan seluruh potensi sumberdaya ekonomi yang dimiliki, dengan cara-cara kreatif dan inovatif, untuk meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati seluruh elemen masyarakat untuk kesejahteraan bersama dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah.

#### 2. Lestari

##### Pilar Pembangunan Lingkungan

Mengandung arti bahwa masyarakat Bondowoso memiliki kemampuan dalam pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keragamannya sehingga kondisinya tetap dapat dipertahankan seperti keadaan semula. Sebab telah disadari dalam pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya harus mengurangi kerusakan (dampak negative sekecil mungkin) dan mempertahankan keberadaan sumber daya alam tidak terbarukan, tetapi juga memperbaiki sumber daya alam terbarukan, serta mencapai kembali keadaan sesuai kapasitasnya yang semula, sehingga dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.



### 3. Sejahtera

#### Pilar Pembangunan Kesejahteraan

Adalah kondisi masyarakat Bondowoso yang terpenuhi segala kebutuhan hidupnya, semua hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh komponen masyarakat di semua wilayah Kabupaten Bondowoso, serta tercipta adanya kesetaraan kondisi yang dibutuhkan bagi setiap warga untuk dapat mengembangkan dirinya secara proporsional sehingga makmur serta sejahtera lahir dan batin.

### 4. Adil dan Terdepan

#### Pilar Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan

Mengandung arti adil yang bersifat distributif, yaitu mendapatkan pelayanan yang sama tanpa pembatasan/diskriminasi dalam bentuk apapun, baik perseorangan, kelompok, maupun kewilayahan, tanpa korupsi, tanpa pungli maupun jual beli jabatan. Sehingga akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, menciptakan situasi aman, dan tenteram, menghapuskan potensi konflik sosial, taat regulasi dan supremasi hukum, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Dengan kondisi tersebut diharapkan 3 (tiga) pilar kekuatan pembangunan, pemerintah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan mampu berperan pada posisi terdepan, dalam setiap upaya meraih keunggulan-keunggulan sehingga mampu bersaing dalam segala bidang untuk tercapainya Bondowoso sebagai kawasan agribisnis yang maju, religius, adil dan makmur.

### 5. Iman dan Takwa

#### Pilar Pembangunan Manusia

Adalah kondisi masyarakat Bondowoso dengan tingkat pendidikan yang tinggi serta derajat kesehatan yang baik, dari semua tingkatan usia, hidup berlandaskan ajaran agama sesuai dengan keyakinan masing-masing



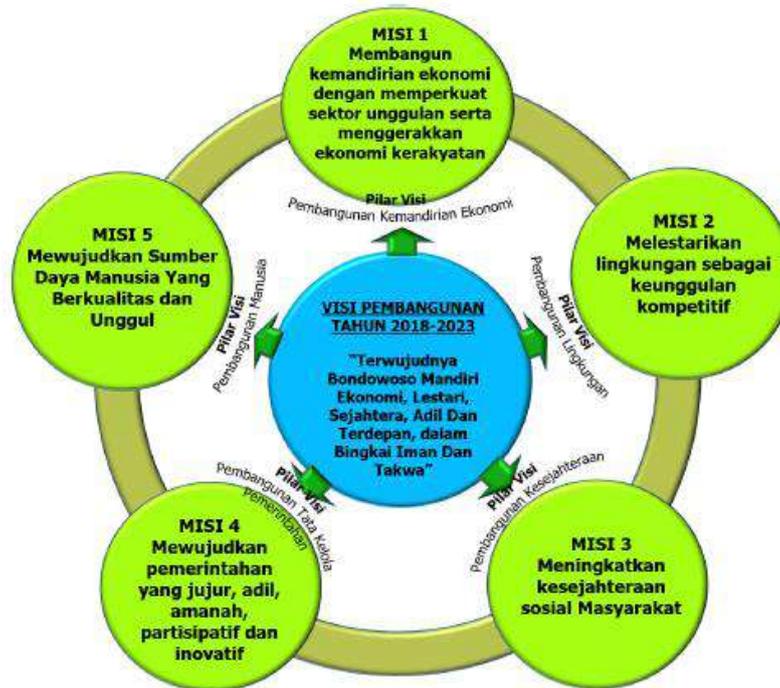
individu, yang mengarah pada peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial, bermuara pada terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat sehari-hari serta diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagaimana dijelaskan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi pembangunan Kabupaten Bondowoso tahun 2018-2023 dibangun atas dasar kondisi dan potensi Kabupaten Bondowoso saat ini, dengan mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi hingga tahun 2023.

Disamping itu juga memperhatikan visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang menitikberatkan pada pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi, serta visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Bondowoso tahun 2005 - 2025, yaitu mewujudkan Kabupaten Bondowoso yang maju, adil dan makmur diwarnai dengan nuansa religius melalui sektor pertanian sebagai andalan.

Misi yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi “Terwujudnya Bondowoso Mandiri Ekonomi, Lestari, Sejahtera, Adil Dan Terdepan, dalam Bingkai Iman Dan Takwa” sebagai berikut:

1. Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan.
2. Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif.
5. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bondowoso sesuai yang tertuang RPJMD maupun RKPD secara terukur dan terarah, yaitu melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang diawali dengan membangun komitmen pimpinan mulai dari Bupati hingga Kepala Perangkat Daerah dan bersama seluruh jajaran birokrasi untuk benar-benar konsisten menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

## 2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan pelaksanaan visi dan misi perlu ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, dan untuk memberikan pedoman pembangunan sehingga terdapat keselarasan antara visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kinerja yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan.



Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang harus dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan (strategy focused management). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang diarahkan dengan serangkaian arah kebijakan.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun. Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 2.1. Tujuan, Sasaran, Strategi RPJMD 2018 - 2023

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan</b>		
1.1 Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas	1.1.1 Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Mengembangkan agrobisnis pedesaan melalui revitalisasi pertanian dan perkebunan rakyat, meningkatkan kualitas dan nilai tambah komoditi unggulan, meningkatkan aksesibilitas petani terhadap teknologi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dagang kecil, fasilitasi usaha perdagangan konvensional dan non konvensional (e-commerce), penguatan kemitraan antara petani dengan pelaku/ pengusaha pengolahan dan pemasaran serta pencitraan produk dalam rangka promosi serta menarik investasi agrobisnis, perluasan pertanian organik, revitalisasi pasar tradisional serta penataan kawasan dan diversifikasi produk unggulan daerah
	1.1.2 Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	2 Mengembangkan destinasi pariwisata sehingga layak kunjung, meningkatkan partisipasi usaha lokal pedesaan dalam industri pariwisata, meningkatkan citra kepariwisataan Bondowoso, promosi pemasaran dan pengelolaan obyek wisata secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan teknologi komunikasi
	1.1.3 Meningkatnya Investasi Daerah	3 Meningkatkan identifikasi potensi dan promosi investasi serta meningkatkan sistem pelayanan untuk mendorong kemudahan berinvestasi serta penataan dan pemanfaatan ruang
	1.1.4 Meningkatnya Usaha Skala Mikro dan kecil	4 Meningkatkan akses usaha mikro terhadap kesempatan pengembangan keterampilan, pendampingan, modal usaha dan teknologi, meningkatkan daya saing usaha mikro dan koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas") dalam rangka mendukung kemandirian ekonomi daerah, pengembangan ekonomi pondok pesantren ( <i>santripreneur</i> )
	1.1.5 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	5 Percepatan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum terutama penunjang ekonomi dan penunjang sektor unggulan lokal sebagai pengungkit utama perekonomian dan kesejahteraan masyarakat
<b>Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif</b>		
2.1 Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup	2.1.1 Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	1 Pengendalian pencemaran (air, udara, dan lahan) yang berupa pencegahan dan pengelolaan timbulnya limbah/sampah, pemulihan akibat pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM lingkungan hidup, penegakan hukum lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat di lingkungan permukiman dan dunia usaha untuk berperilaku ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari
	2.1.2 Meningkatnya Kualitas Lingkungan permukiman	



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>		
3.1 Menurunnya Tingkat Kemiskinan	3.1.1 Terkendalinya pertumbuhan penduduk	1 Pengendalian Kuantitas Penduduk melalui Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
	3.1.2 Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	2 Memperluas kesempatan kerja melalui fasilitasi akses informasi ketenagakerjaan dan meningkatkan produktifitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembinaan
	3.1.3 Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	3 Melakukan fasilitasi terhadap masyarakat perdesaan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya lokal untuk kemandirian masyarakat
<b>Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif</b>		
4.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	4.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintah daerah	1 Meningkatkan kualitas kinerja aparatur yang profesional, menciptakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi publik, serta kualitas kinerja akuntabilitas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah daerah, transparansi rekrutmen dalam jabatan dan pengembangan E-Gov
4.2 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat	4.2.1 Meningkatnya kerukunan antar Suku, Agama, Ras dan antar golongan	1 Meningkatkan jalinan kerjasama dan kemitraan dengan lembaga sosial keagamaan, tokoh agama, cendekiawan dan masyarakat dalam pembinaan karakter untuk meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama dalam rangka pencegahan serta penanganan konflik sosial dan politik
	4.2.2 Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	2 Meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat khususnya dalam menghadapi bencana serta meningkatkan kesadaran dan budaya masyarakat yang tertib dan taat terhadap peraturan dan Norma
<b>Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul</b>		
5.1 Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	5.1.1 Meningkatnya derajat pendidikan	1 Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan infrastruktur, sarana prasarana, kualitas pembelajaran dan penguatan manajemen, serta kualitas pelayanan dengan melibatkan masyarakat secara optimal, pemberdayaan dan penguatan sumberdaya keagamaan serta kemasyarakatan untuk penguatan pendidikan karakter, fasilitasi pengembangan infrastruktur pendidikan dan kebudayaan, fasilitasi pengembangan infrastruktur kesehatan tingkat desa dan ponpes serta integrasi jaminan sosial
	5.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan	
	5.1.3 Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	2 Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang sudah tersedia secara optimal untuk mendukung pembinaan prestasi pemuda dan olah raga serta fasilitasi pengembangan infrastruktur keolahragaan
	5.1.4 Meningkatnya Prestasi Olahraga	
	5.1.5 Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	3 Meningkatkan pemahaman dan komitmen pentingnya perspektif pemberdayaan gender dan implementasinya dalam berbagai bidang pembangunan termasuk pencapaian kabupaten layak anak serta peningkatan layanan publik bagi penyandang disabilitas



Tabel 2.2. Arah Kebijakan RPJMD 2018 - 2023

Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan Pembangunan					
	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
Sasaran 4.1.1		Meningkatkan kualitas Pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta inovasi sistem pemerintahan yang terintegratif dalam proses bisnis di semua level pemerintahan				
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4		Pengembangan sektor unggulan dan potensi ekonomi lokal untuk mendorong peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat				
Sasaran 1.1.5 Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3 Sasaran 1.1.2 Sasaran 5.1.3		Percepatan pembangunan infrastruktur dasar penunjang perekonomian dan pengembangan industri pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat				
Sasaran 1.1.1 Sasaran 1.1.2 Sasaran 1.1.3 Sasaran 1.1.4 Sasaran 3.1.1 Sasaran 3.1.2 Sasaran 3.1.3		Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi, Daya Saing dan Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran 1.1.5 Sasaran 2.1.1 Sasaran 2.1.2	Pembangunan Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan					
Sasaran 5.1.1 Sasaran 5.1.2 Sasaran 5.1.3 Sasaran 5.1.4 Sasaran 5.1.5 Sasaran 4.2.1 Sasaran 4.2.2 Sasaran 3.1.1	Mengembangkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan pemberdayaan berbasis peningkatan karakter serta budaya masyarakat dalam rangka menjaga ketenteraman dan ketertiban umum menciptakan stabilitas sosial dan politik					



### **C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021**

Untuk merealisasikan arah kebijakan dan strategi yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, diperlukan penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sesuai dengan rencana 1 (satu) tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dengan tema **“Peningkatan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja berbasis teknologi informasi serta pengembangan infrastruktur untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat”**.

Sasaran Strategis adalah manfaat yang diharapkan dari suatu program dan kegiatan pilihan yang ditetapkan dengan indikator kinerja utama berdasarkan strategi dan arah kebijakan. Rumusan Sasaran Strategis Pemerintah Kabupaten Bondowoso pada tahun 2020 ditetapkan sebanyak 18 (delapan belas) sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis yang diharapkan, serta merupakan ikhtisar manfaat (benefit) dari pelaksanaan program dan kegiatan suatu organisasi. Rumusan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bondowoso dari 18 (delapan belas) sasaran strategis ditetapkan sebanyak 26 (dua puluh enam) indikator kinerja utama, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso.

Sasaran strategis yang diharapkan dapat direalisasikan dalam program prioritas sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, selaras dengan fokus pembangunan di dalam RKP Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 2021 dengan tema yaitu **“Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dan juga selaras dengan Penyusunan tema RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2021 dengan tema **“Meningkatkan Industri, Pariwisata dan Investasi di Jawa Timur yang didukung oleh SDM dan Infrastuktur untuk Pertumbuhan Berkualitas”** disajikan dalam tabel berikut :



Tabel 2.3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama, Formula Indikator dan Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Pertanian (th n)} - \sum \text{PDRB ADHB Sektor Pertanian (th n-1)}}{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Pertanian (n-1)}} \times 100\%$	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
			Penyuluhan Pertanian	
2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4. Persentase Kontribusi PDRB Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Pariwisata (th n)}}{\sum \text{PDRB ADHB (th n)}} \times 100\%$	Pemasaran Pariwisata	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Pengembangan Destinasi Pariwisata	
1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	2. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Industri (th n)} - \sum \text{PDRB ADHB Sektor Industri (th n-1)}}{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Industri (n-1)}} \times 100\%$	Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	
			Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	
1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	3. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan (ADHB)	$\frac{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan (th n)} - \sum \text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan (th n-1)}}{\sum \text{PDRB ADHB Sektor Perdagangan (n-1)}} \times 100\%$	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Ekspor	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
3. Meningkatnya Investasi Daerah	5. Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	$\frac{\sum \text{Investasi (th n)} - \sum \text{Investasi (th n-1)}}{\sum \text{Investasi (th n-1)}} \times 100\%$	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
			Pelayanan Penanaman Modal	
			Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
			Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
			Promosi Penanaman Modal	
4. Meningkatnya Usaha Skala Mikro	6. Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	$\frac{\sum \text{UMKM yg Naik Skala Usaha}}{\sum \text{UMKM yang dibina}} \times 100\%$	Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
			Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	
			Pengembangan UMKM	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7. Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Memadai	50% Infrastruktur Jalan + 30% Infrastruktur Irigasi + 20% Infrastruktur Sanitasi	Pembangunan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pembangunan, Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
			Peningkatan dan Pemeliharaan Bangunan Penyediaan Air Baku	
			Kemitraan dan Jasa Konstruksi	
			Operasi dan Pemeliharaan	
			Pengelolaan Keciptakarya	
			Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas LH dan Perhubungan
6. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	8. Indeks Kualitas Air	Nilai yang membandingkan data kualitas air dengan baku mutu air	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan
	9. Indeks Kualitas Udara	Nilai yang membandingkan data kualitas udara dengan baku mutu udara	Perlindungan Konservasi Sumber daya Alam dan Peningkatan Akses Informasi	
	10. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Nilai yang membandingkan luas Kawasan lindung budidaya terhadap luas wilayah	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
			Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati) Pengelolaan Persampahan Peningkatan Prasaran, Srana dan Utilitas Umum (PSU)	
7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	11. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	$\frac{\sum \text{Luas Lahan Kumuh}}{\sum \text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times 100\%$	Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	12. Laju Pertumbuhan Penduduk	$\frac{\sum \text{Penduduk (th n)} - \sum \text{Penduduk (th n-1)}}{\sum \text{Penduduk (th n-1)}} \times 100\%$	Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Pengendalian Penduduk	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	13. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\sum \text{Pengangguran (th n)}}{\sum \text{Angkatan Kerja (th n)}} \times 100\%$	Penempatan Tenaga Kerja Hubungan Industrial	Dinas Penanaman Modal PTSP dan Tenaga Kerja
10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	14. Indeks Desa Membangun (IDM)	$\frac{1}{3} \times (\text{Indeks Sosial} + \text{Indeks Ekonomi} + \text{Indeks Lingkungan})$	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masy. Hukum Adat Penataan Desa Administrasi Pemerintahan Desa Rehabilitasi Sosial	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH	
			Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat		
			Penanganan Kerawanan Pangan		
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	15. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai rata-rata dari nilai timbang x 25	Penataan Administrasi Kependudukan	Dispenduk-capil	
			Pencatatan Sipil		
		Aplikasi Informatika	Diskominfo		
	16. Nilai SAKIP	Nilai dan predikat hasil evaluasi SAKIP pada tahun ke-n oleh Kementerian PAN-RB	Penataan Organisasi (Kegiatan)	Sekretariat Daerah/Bappeda/Inspektorat	
	17. Nilai Opini BPK		Nilai dan Predikat atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun ke-n oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah/Inspektorat
				Penyelenggaraan Pengawasan	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (Kegiatan)	



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
	18.Nilai EKPPD	Nilai dan Predikat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) pada tahun ke-n oleh Kementerian Dalam Negeri	Administrasi Pemerintahan (Kegiatan)	Sekretariat Daerah/Bappeda/ Inspektorat
12. Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	19.Persentase Potensi Konflik SARA Yang Ditangani	$\sum$ Potensi konflik SARA yang diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		$\frac{\sum \text{Potensi konflik SARA (th n)}}{n}$	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	
13. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	20.Persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	$\frac{\% \text{ Desa/Kelurahan Tangguh Bencana} + \% \text{ Bencana yang Ditangani Tepat Waktu} + \% \text{ Normalisasi Korban Bencana}}{n \text{ (banyaknya faktor)}} \times 100$	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Pol PP
			Penanggulangan Bencana	BPBD
14. Meningkatnya derajat pendidikan	21.Indeks Pendidikan	$\frac{1}{2} \times (\text{Indeks Rata Lama Sekolah} + \text{Indeks Harapan Lama sekolah}) \times 100\%$	Pengelolaan Pendidikan	Dikbud
15. Meningkatnya derajat kesehatan	22.Indeks Kesehatan	Indeks Harapan Hidup X 100%	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes RSU
16. Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	23.Status Kabupaten Layak Pemuda	Status Kabupaten layak pemuda atas pemenuhan terhadap indikator regulasi, infrastruktur, kelembagaan dan kemandirian pemuda	Peningkatan Pemberdayaan Kepemudaan	Disparpora



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULA INDIKATOR	PROGRAM	PERANGKAT DAERAH
17. Meningkatnya Prestasi Olahraga	24. Persentase Atlet Berprestasi	$\frac{\sum \text{Atlet yang berprestasi}}{\sum \text{Atlet yang ada}} \times 100$	Peningkatan Pengembangan Keolahragaan	Disparpora
18. Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	25. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia dengan memperhatikan ketimpangan gender	Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas PPKB
	26. Status Kabupaten Layak Anak	Status Kabupaten/Kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak	Pemenuhan Hak Anak	



#### D. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja yang disajikan setelah terdapat penyesuaian dengan Perubahan RKPD 2021 dan KU PAPBD Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	2,70%
	2. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	3,00%
	3. Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	5,00%
2. Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4. Persentase Kontribusi PDRB Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,20%
3. Meningkatnya Investasi Daerah	5. Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	8,00%
4. Meningkatnya Usaha Skala Mikro	6. Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	0,05%
5. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7. Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Memadai	70,37%
6. Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	8. Indeks Kualitas Air	53,39
	9. Indeks Kualitas Udara	82,86
	10. Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,70
7. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	11. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0.75%
8. Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	12. Laju Pertumbuhan Penduduk	0.32%



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
9. Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	13. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3%
10. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	14. Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7050
11. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	15. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5
	16. Nilai SAKIP	A
	17. Nilai Opini BPK	WTP
	18. Nilai EKPPD	3.22
12. Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	19. Persentase Potensi Konflik SARA Yang Ditangani	100%
13. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	20. Persentase ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana	100%
14. Meningkatnya derajat pendidikan	21. Indeks Pendidikan	55
15. Meningkatnya derajat kesehatan	22. Indeks Kesehatan	72,43
16. Meningkatnya kualitas dan peran serta pemuda dalam pembangunan	23. Status Kabupaten Layak Pemuda	Pratama
17. Meningkatnya Prestasi Olahraga	24. Persentase Atlet Berprestasi	-
18. Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak	25. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,89
	26. Status Kabupaten Layak Anak	Madya



## BAB 3

# AKUNTABILITAS KINERJA

---



Komitmen pemerintah daerah terhadap kinerja dirumuskan dalam bentuk penerapan anggaran dan sekaligus manajemen berbasis kinerja. Hal ini mengandung makna bahwa capaian kinerja pemerintahan diukur dengan indikator dan target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, yaitu target kinerja yang ada di dalam RPJMD.

Dalam konteks perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, maka manajemen kinerja yang dimaksud adalah membandingkan antara capaian kinerja dengan perencanaan kinerja yang sudah dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, secara tegas dinyatakan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah membandingkan antara indikator dan target strategis yang sudah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) dengan realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Meski demikian, dalam pemerintahan dengan manajemen berbasis kinerja disebutkan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, namun harus berbasis kinerja yang berorientasi untuk perbaikan kinerja, dimana sumberdaya aparatur dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapainya, baik pada level keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), maupun dampak (*impact*).



## A. Sistem Pengukuran Kinerja

Kerangka pengukuran kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, dimana dalam penarikan kesimpulan terhadap kategori capaian kinerja mengacu skala ordinal dari Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun cara pengukuran kinerja diperhitungkan dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Jika ukurannya sebaliknya, yaitu apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

3. Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator sasaran strategis dikategorikan sesuai dengan rentang capaian, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1. Kategori Penilaian Capaian Kinerja**

Rentang Capaian	Kategori
Capaian $\geq$ 100%	Memuaskan
$85 \leq$ Capaian $<$ 100	Sangat Berhasil
$70 \leq$ Capaian $<$ 85	Berhasil
$55 \leq$ Capaian $<$ 70	Cukup Berhasil
Capaian $<$ 55	Kurang Berhasil

**B. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso, sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2023.

Adapun capaian indikator sasaran strategis yang sudah ditetapkan berdasarkan target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021, dalam tabel berikut :

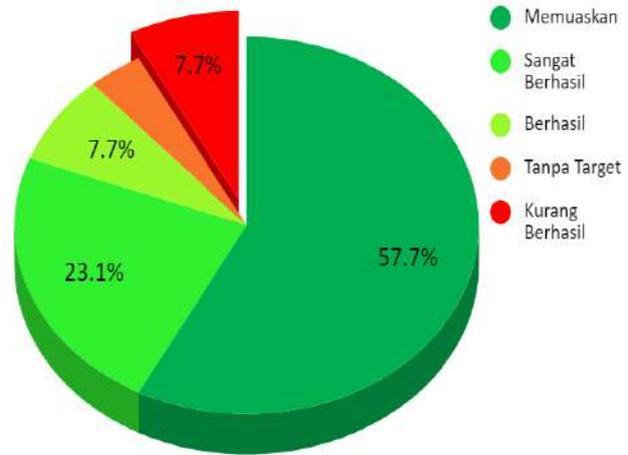
**Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
<b>Misi 1 : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan</b>					
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan</b>					
1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian	2,70%	4,35%	161,11%	Memuaskan
2	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,00%	7,94%	262,67%	Memuaskan
3	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	5,00%	8,91%	178,20%	Memuaskan
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata</b>					
4	Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,20%	0,99%	82,50%	Berhasil
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Investasi Daerah</b>					
5	Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	8,00%	198,54%	2.481,75%	Memuaskan
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Usaha Skala Mikro</b>					
6	Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha	0,05	1,55	3.100%	Memuaskan
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi</b>					
7	Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang memadai	70,37%	73,21%	104,04%	Memuaskan

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI
<b>Misi 2 : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif</b>					
<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas Air,Udara dan Tutupan Lahan</b>					
8	Indeks Kualitas Air	53,33	50	93,65%	Sangat Berhasil
9	Indeks Kualitas Udara	83,70	85,33	102,98%	Memuaskan
10	Indeks Tutupan Lahan	64,93	59,49	98,01%	Sangat Berhasil
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman</b>					
11	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0,75%	0,75%	100,00%	Memuaskan
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat</b>					
<b>Sasaran 8 : Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk</b>					
12	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,32%	0,31%	103,13%	Memuaskan
<b>Sasaran 9 : Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka</b>					
13	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	3%	4,46%	51,33%	Kurang Berhasil
<b>Sasaran 10 : Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat</b>					
14	Indeks Desa Membangun	0,7050	0,781	110,78%	Memuaskan
<b>Misi 4 : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif</b>					
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah</b>					
15	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5	81,78	102,87%	Memuaskan
16	Nilai SAKIP	A	BB*	87,54%	Sangat Berhasil
17	Nilai Opini BPK	WTP	WTP*	100%	Memuaskan
18	Nilai EKPPD	3,22	3,22*	100%	Memuaskan
<b>Sasaran 12 : Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan</b>					
19	Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani	100%	100%	100%	Memuaskan
<b>Sasaran 13 : Meningkatnya Perlindungan terhadap Masyarakat</b>					
20	Persentase Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana	100%	79,45%	79,45%	Berhasil
<b>Misi 5 : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul</b>					
<b>Sasaran 14 : Meningkatnya Derajat Pendidikan</b>					
21	Indeks Pendidikan	55	56,72	103,13%	Memuaskan
<b>Sasaran 15 : Meningkatnya Derajat Kesehatan</b>					
22	Indeks Kesehatan	72,43	72,14	99,72%	Sangat Berhasil
<b>Sasaran 16 : Meningkatnya Kualitas dan Peranserta Pemuda dalam Pembangunan</b>					
23	Status Kabupaten Layak Pemuda	-	Pratama	-	
<b>Sasaran 17 : Meningkatnya Prestasi Olahraga</b>					
24	Presentase Atlet Berprestasi	-	-	-	
<b>Sasaran 18 : Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak</b>					
25	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,89	90,68	99,74%	Sangat Berhasil
26	Status Kabupaten Layak Anak	Madya	Pratama	90,00%	Sangat Berhasil

Sumber : Badan Perencanaan Daerah, Perangkat Daerah, dan BPS (data diolah), Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 26 indikator kinerja utama Bupati tahun 2021, disimpulkan bahwa 15 (lima belas) indikator kinerja utama atau sebanyak 57,7% dalam kriteria **memuaskan**, bahkan 11 (sebelas) IKU diantaranya realisasi mencapai lebih dari 100%. 6 (enam) IKU atau 23,1% masuk dalam kriteria **sangat berhasil**, 2 (dua) IKU atau 7,7% masuk dalam kriteria **berhasil**, 2 (dua) IKU atau 7,7% masuk dalam kriteria **kurang berhasil**. dan 1 (satu) IKU atau 4% tidak ada target.



Grafik 3.1 Pencapaian IKU Bupati Tahun 2021

15 (limabelas) IKU yang masuk kriteria memuaskan dari target yang ditetapkan yaitu Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian 161.11%, Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan 262.67%, Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan 178.20%, Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah 2481.75%, Persentase Usaha Mikro yang mengalami peningkatan skala usaha 3.100%, Persentase infrastruktur pekerjaan umum yang memadai 104.04%, Indeks Kualitas Udara 101.95%, Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh 100.00%, Laju Pertumbuhan Penduduk 144,07%, Indeks Desa Membangun 117.44%, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 102,87%, Nilai Opini BPK 100%, Nilai EKPPD 100%, Persentase Konflik Sosial Yang Ditangani 100%, Indeks Pendidikan 103.13%.

6 (enam) IKU yang masuk kriteria sangat berhasil dari target yang ditetapkan yaitu Indeks Kualitas Air 93.65%, Indeks Tutupan Lahan 98.01%, Nilai SAKIP 87,54%, Indeks Kesehatan 99.72%, Indeks Pembangunan Gender (IPG) 99.74%, Status Kabupaten Layak Anak 90%.

2 (dua) IKU yang masuk kriteria berhasil dari target yang ditetapkan yaitu Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB) 82.50%, Persentase Ketangguhan Daerah dalam Menghadapi Bencana 79.45%.

2 (dua) IKU yang masuk kriteria kurang berhasil dari target yang ditetapkan yaitu Tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 51.33%, Status Kabupaten Layak Pemuda masih belum mencapai status Pratama.



## BAB 4

# PENUTUP



Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2019, disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran strategisnya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 01 Tahun 2019 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 – 2023 dan memberikan gambaran bahwa Kinerja Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 rata-rata telah tercapai sebesar 111,91% atau dengan kategori memuaskan.

Pencapaian target indikator sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 pada umumnya telah dipenuhi sesuai dengan harapan.

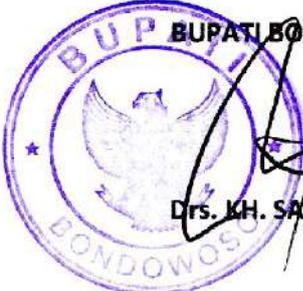
Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi kinerja dari 5 Misi yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023 melalui metode rata-rata tertimbang capaian kinerja setiap sasaran strategis, maka diperoleh penilaian kategori tingkat keberhasilan, dengan rincian berikut :



- Misi 1** : Membangun kemandirian ekonomi dengan memperkuat sektor unggulan serta menggerakkan ekonomi kerakyatan, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 1.032,24% dengan kategori **memuaskan**.
- Misi 2** : Melestarikan lingkungan sebagai keunggulan kompetitif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 96,80% atau kategori **sangat berhasil**.
- Misi 3** : Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 88,41% dengan kategori **sangat berhasil**.
- Misi 4** : Mewujudkan pemerintahan yang jujur, adil, amanah, partisipatif dan inovatif, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 98,40% dengan kategori **sangat berhasil**.
- Misi 5** : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 101,36% dengan kategori **memuaskan**.

Pencapaian target indikator sasaran strategis dalam RPJMD Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 - 2023, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bondowoso, yang telah dilaksanakan selama tahun 2021 pada umumnya telah dipenuhi sesuai dengan harapan. Namun sejujurnya masih terdapat capaian sasaran strategis yang belum memenuhi target yang ditetapkan, karena semata-mata ketidaksempurnaan kami sebagai manusia biasa, dan dengan segala kekurangan tersebut tentunya menjadi motivasi bagi kami untuk lebih baik pada masa yang akan datang.

Bondowoso, 15 Maret 2022

  
BUPATI BONDOWOSO  
Drs. KH. SALWA ARIFIN



## LAMPIRAN



### BUPATI BONDOWOSO PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

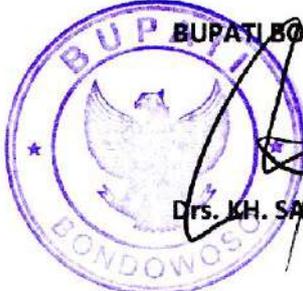
Nama : **Drs. KH. SALWA ARIFIN**

Jabatan : **BUPATI BONDOWOSO**

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bondowoso, 1 Nopember 2021

 **BUPATI BONDOWOSO**  
  
**Drs. KH. SALWA ARIFIN**



Lampiran :				
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021				
BUPATI BONDOWOSO				
No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan	1 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Pertanian (ADHB)	2,70%	
		2 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (ADHB)	3,00%	
		3 Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Perdagangan	5,00%	
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata	4 Persentase Kontribusi Kategori Pariwisata terhadap PDRB (ADHB)	1,20%	
3	Meningkatnya Investasi Daerah	5 Persentase Pertumbuhan Investasi Daerah	8,00%	
4	Meningkatnya Usaha Skala Mikro	6 Persentase Usaha Mikro Yang Mengalami Peningkatan Skala Usaha	0,05%	
5	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Penunjang Ekonomi	7 Persentase Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Memadai	70,37%	
6	Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan	8 Indeks Kualitas Air	53,39	
		9 Indeks Kualitas Udara	82,86	
		10 Indeks Kualitas Tutupan Lahan	60,70	
7	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	11 Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh	0.75%	
8	Terkendalnya Pertumbuhan Penduduk	12 Laju Pertumbuhan Penduduk	0.32%	
9	Menurunnya Angka Tingkat Pengangguran Terbuka	13 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3%	
10	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	14 Indeks Desa Membangun (IDM)	0,7050	



11	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah	15 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	79,5
		16 Nilai SAKIP	A
		17 Nilai Opini BPK	WTP
		18 Nilai EKPPD	3,22
12	Meningkatnya Kerukunan Antar Suku, Agama, Ras Dan Antar Golongan	19 Persentase konflik sosial yang ditangani	100%
13	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat	20 Persentase ketangguhan Daerah dalam menghadapi bencana	100%
14	Meningkatnya Derajat Pendidikan	21 Indeks Pendidikan	55
15	Meningkatnya Derajat Kesehatan	22 Indeks Kesehatan	72,43
16	Meningkatnya Kualitas dan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan	23 Status Kabupaten Layak Pemuda	Pratama
17	Meningkatnya Prestasi Olahraga	24 Presentase Atlet Berprestasi	-
18	Meningkatnya Pemberdayaan Gender serta Pelindungan Perempuan dan Anak	25 Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,89
		26 Status Kabupaten Layak Anak	Madya

Bondowoso, 1 Nopember 2021

**BUPATI BONDOWOSO**  
  
**Drs. KH. SALWA ARIFIN**



Lampiran :		
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BUPATI BONDOWOSO		
No.	Program	Anggaran
1	Penyuluhan Pertanian	1.792.741.700
2	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	9.666.756.000
3	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	4.449.489.000
4	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Masyarakat Veteriner	107.163.000
5	Perencanaan Dan Pembangunan Industri	5.125.374.150
6	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	141.640.000
7	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	25.388.300
8	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	392.900.300
9	Pengembangan Ekspor	249.285.400
10	Pemasaran Pariwisata	935.850.000
11	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	8.414.146.100
12	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.243.743.600
13	Pelayanan Penanaman Modal	235.321.800
14	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.000.000
15	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	30.309.800
16	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	431.881.300
17	Promosi Penanaman Modal	11.692.400
18	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	7.231.700
19	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	13.068.300
20	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	459.181.000
21	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	142.090.000
22	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	360.558.200
23	Pengembangan UMKM	6.117.146.600

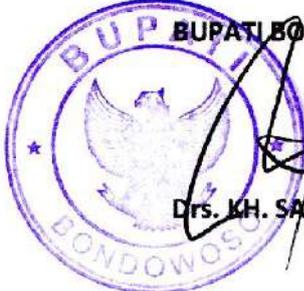
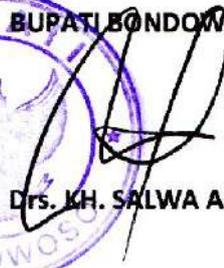


No.	Program	Anggaran
26	Program Penyelenggaraan Jalan	67.435.190.305
27	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	951.780.500
28	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	22.479.327.530
29	Penyelenggaraan Penataan Ruang	808.788.000
30	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	16.026.547.000
31	Penataan Bangunan Gedung	1.519.426.800
32	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	23.730.912.235
33	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	388.494.200
34	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	101.853.800
35	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	649.962.800
36	Pengelolaan Persampahan	2.102.019.200
37	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	11.442.863.121
38	Pengembangan Perumahan	388.213.590
39	Pengendalian Penduduk	192.494.550
40	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	7.503.836.000
41	Penempatan Tenaga Kerja	1.785.487.800
42	Hubungan Industrial	107.461.300
43	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	12.840.199.500
44	Penataan Desa	134.875.000
45	Administrasi Pemerintahan Desa	2.148.513.900
46	Rehabilitasi Sosial	965.378.000
47	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	341.118.530
48	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	501.636.890
49	Penanganan Kerawanan Pangan	222.265.000
50	Penataan Organisasi (kegiatan)	1.195.471.900
51	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	89.766.000



No.	Program	Anggaran
52	Pencatatan Sipil	943.991.600
53	Aplikasi Informatika	6.716.992.170
54	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	743.788.900
55	Administrasi Tata Pemerintahan (kegiatan)	1.031.357.000
56	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan (kegiatan)	776.084.000
57	Penyelenggaraan Pengawasan	1.566.953.600
58	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	3.120.579.000
59	Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	475.786.500
60	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	961.085.900
61	Penanggulangan Bencana	8.035.893.282
62	Pengelolaan Pendidikan	163.323.794.150
63	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Dinas Kesehatan)	192.464.675.848
	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (RSU Dr. Koesnadi)	135.933.374.897
64	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.028.366.900
65	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	2.073.843.500
66	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	120.595.810
67	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	110.723.500
	TOTAL	736.836.728.658

Bondowoso, 1 November 2021


**BUPATI BONDOWOSO**  
  
**Drs. KH. SALWA ARIFIN**



## PENGHARGAAN























